

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013



<http://papuabarot.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAFUA BARAT**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013

Nomor ISSN : 2089-1660
Nomor Publikasi : 91300.14.16
Katalog BPS : 4102002.91
Ukuran Buku : 16,5 x 21,5 cm
Jumlah Halaman : vii rumawi + 123 halaman

Naskah :

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Gambar Kulit :

Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Diterbitkan oleh :

BPS Provinsi Papua Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

KATA PENGANTAR

Publikasi **Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2013** ini merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2013.

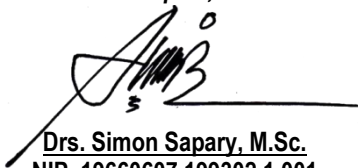
Adapun data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat, hasil penghitungan besaran IPM beserta komponen-komponen serta perkembangannya, disparitas IPM antar wilayah, dan posisi absolut antar wilayah dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara simultan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Manokwari, Oktober 2014

**Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat**

Kepala,



Drs. Simon Sapary, M.Sc.
NIP. 19660607 199302 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	8
1.3 Manfaat Penulisan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
II. Metodologi	11
2.1 Sejarah Penghitungan IPM	11
2.2 Sumber Data	12
2.3 Metode Penyusunan Indeks	12
2.4 Besaran Skala IPM	18
III. KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2013	19
3.1 Kependudukan	19
3.2 Kondisi Kesehatan	27
3.2.1 Sarana Kesehatan	27
3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat	35
3.3 Kondisi Pendidikan	48
3.3.1 Angka Melek Huruf	51
3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah	55
3.3.3 Angka Partisipasi Sekolah	57
3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	63
3.4 Kondisi Perekonomian	66
3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	66
3.4.2 Struktur Ekonomi Regional	68
3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi	71
3.4.4 PDRB per Kapita	72

IV	Perkembangan Komponen IPM 2011-2013	75
4.1	Perkembangan Kesehatan	76
4.2	Perkembangan Pendidikan	78
4.2.1	Perkembangan Angka Melek huruf	78
4.2.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah	80
4.3	Perkembangan Paritas Daya Beli	82
4.4	Perkembangan IPM	84
4.5	Reduksi Shortfall	87
V	Disparitas IPM Antar Wilayah	90
5.1	Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	91
5.2	Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota secara Nasional	96
5.3	Perbandingan Absolut Antar Daerah Dalam Diagram Kuadran	98
5.3.1	IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	99
5.3.2	IPM Terhadap PDRB per Kapita	105
5.4	Analisis Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	110
VI	Penutup	113
	Daftar Pustaka	116
	Lampiran	119

Daftar Tabel

No	Judul Tabel	Hal.
2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM	17
3.1	Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk/Km ² Papua Barat Tahun 2013	23
3.2	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Posyandu di Provinsi Papua Barat Tahun 2013	30
3.3	Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2013	31
3.4	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2013	33
3.5	Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat 2011-2013	38
3.6	Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	40
3.7	Persentase Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2013	43
3.8	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2013	46
3.9	Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	48
3.10	Persentase Kemampuan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas membaca Huruf Latin, Huruf Arab, Huruf Lainnya dan Angka Buta Huruf Provinsi Papua Barat Tahun 2013	54
3.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2013	59

3.12	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2013	61
3.13	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Papua Barat 2011-2013	64
3.14	PDRB Menurut Kabupaten/Kota ADHB dan ADHK Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013 (Juta Rupiah)	68
3.15	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	69
3.16	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013 (Rupiah)	74
4.1	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	77
4.2	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	79
4.3	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	81
4.4	Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	83
4.5	IPM dan Perubahan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	85
4.6	Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	88
5.1	IPM dan Peringkat Nasional IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	97

Daftar Gambar

No.	Judul Gambar	Hal.
2.1	Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia	13
3.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Papua Barat Tahun 1971-2013	20
3.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Papua Barat Tahun 1971-2013	21
3.3	Piramida Penduduk Provinsi Papua Barat Tahun 2013	24
3.4	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat Tahun 2013	25
3.5	Jumlah Rumah Sakit yang Telah Beroperasi dan Rasio Penduduk-Rumah Sakit di Papua Barat Tahun 2013	28
3.6	Jumlah Rumah Sakit Menurut Jenisnya di Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2013	29
3.7	Rata-rata Anak Lahir Hidup dan Masih Hidup Menurut Kelompok Wanita Usia Subur di Provinsi Papua Barat Tahun 2013	36
3.8	Persentase Tingkat Keluhan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	42
3.9	Persentase Penggunaan Fasilitas Air Bersih Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	45
3.10	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	52
3.11	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	55
3.12	Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	57
3.13	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2013 (%)	72
5.1	Boxplot IPM Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013	93

5.2	Dendogram Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2013	94
5.3	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2011	100
5.4	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2012	102
5.5	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Barat Tahun 2013	103
5.6	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2011	106
5.7	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2012	107
5.8	Sebaran Posisi Kabupaten/Kota Menurut IPM dan PDRB per Kapita di Provinsi Papua Barat Tahun 2013	108
5.9	Ukuran Pembangunan dan Peringkat Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Tahun 2013	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja perekonomian suatu daerah seringkali diukur dengan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut Konferensi Internasional bertema Asia 2015 di London pada 6-7 Maret 2006 paradigma tersebut tidak selamanya efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

Besaran PDRB Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 50.908,73 miliar, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 15.061,51 miliar. Sementara pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2013 dengan migas sebesar 9,3 persen terhadap tahun 2012 (*year on year*). Sedangkan pertumbuhan PDRB tanpa migas pada tahun 2012 mencapai 17,62 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB dengan migas. Seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2013. Pada tahun 2012 sektor industri pengolahan memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi akan tetapi pada tahun 2013 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 12,66 persen.

Jumlah penduduk miskin Provinsi Papua Barat (September) tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan dengan (Maret) tahun 2013 yaitu menjadi sebesar 234,23 ribu jiwa (27,14 persen) dari 224,27 ribu jiwa (26,67 persen). Meskipun persentase penduduk miskin tidak

mengalami peningkatan yang signifikan, namun persentase penduduk miskin Papua Barat masih berada pada peringkat kedua kemiskinan di Indonesia.

Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat ini terutama terkonsentrasi di daerah perdesaan mencapai 221,38 ribu jiwa (94,51 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan hanya sebesar 12,85 ribu jiwa (5,49 persen) dari total penduduk miskin.

Indikator penting ketenagakerjaan yang sering mendapatkan perhatian adalah terkait isu pengangguran. Jumlah pengangguran mengalami penurunan pada Agustus 2013 menjadi 17.131 orang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2012 sebesar 19.856 orang. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kondisi Agustus 2013 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus 2012 yaitu menjadi 4,62 persen dari 5,49 persen.

Kinerja perekonomian yang diukur melalui besaran nilai PDRB agar dapat dinikmati sebesar-besarnya oleh seluruh masyarakat, maka pendapatan tersebut harus terdistribusi secara merata. Pengukuran seberapa besar pemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran konsumsi masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien *gini ratio*. Bila diperbandingkan, diperoleh fakta bahwa *gini ratio* tahun 2010-2013 di Provinsi Papua Barat ketimpangan distribusi pendapatan umumnya semakin meningkat. Hal ini dijelaskan oleh nilai koefisien *gini ratio* yang cenderung mengalami peningkatan dari 0,37 di tahun 2010 menjadi 0,39 di tahun 2011. Pada tahun 2012 koefisien *gini ratio* kembali meningkat menjadi 0,42 sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sehingga menjadi 0,41.

Tingkat pemerataan pendapatan menurut Bank Dunia dengan mengelompokkan menjadi 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan teratas juga menggambarkan kondisi yang serupa. Ketidakmerataan pendapatan terutama terjadi pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 20 persen berpendapatan teratas. Pada tahun 2013 pada kelompok berpendapatan rendah, distribusi pendapatan yang semestinya diterima 40 persen penduduk ternyata hanya 16,03 persen. Sementara pada kelompok penduduk dengan pendapatan teratas yang semestinya menerima distribusi pendapatan sebesar 20 persen ternyata pada kelompok ini menikmati 48,38 persen dari total pendapatan.

Dampak dari produksi LNG Tangguh yang telah mulai beroperasi pada akhir tahun 2009, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat tahun 2011 mencapai 27,22 persen, jauh lebih tinggi dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi Papua Barat 2013 terhadap 2012 pun lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,78). Bahkan bila dibandingkan tanpa memperhitungkan subsektor migas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat tetap lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 17,62 persen berbanding 6,25 persen. Relatif tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dinilai belum berkualitas karena disisi lain persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi. Disamping itu koefisien *gini ratio* yang tidak mengalami perbaikan yang signifikan menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga pendapatan yang dihasilkan tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya didasarkan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi saja dirasakan kurang efektif. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Mengapa pembangunan manusia?. Banyak alasan mengapa pembangunan manusia mendapatkan tempat yang istimewa dalam program pembangunan. Dalam sejarah didunia terbukti bahwa sangat jarang negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya. Korea Selatan dan Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya alam tetapi sukses dalam mengembangkan sumber daya manusia. Disamping itu pengalaman menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan menjadi kurang efektif tanpa diimbangi dengan pengurangan kesenjangan pendapatan. Fakta lainnya yaitu di Amerika Latin membuktikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menghambat potensi-potensi pertumbuhan ekonomi. Masalah itu sebagian besar timbul karena negara-negara Amerika Latin cenderung mengabaikan investasi pada manusia, khususnya rumah tangga miskin. Akibatnya, saat kesempatan ekonomi meluas, kelompok rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menimbulkan masalah sosial.

Perbaikan kesenjangan hanya bisa dicapai dengan melakukan investasi pada pembangunan manusia, baik dalam meningkatkan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun meningkatkan akses, kualitas, dan layanan di bidang kesehatan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Di antara pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

- **Produktivitas.** Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.
- **Ekuitas.** Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.
- **Kesinambungan.** Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi.
- **Pemberdayaan.** Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan tanpa mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pembangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Oleh karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity* (PPP). Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator kemampuan daya beli untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dan memperluas pilihan-pilihan manusia (*enlarging the choice of the people*). Dua faktor penting yang dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Capaian pembangunan manusia yang tinggi diperlukan sebuah percepatan untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara, untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan

distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil harus mengalami kegagalan karena ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Perhatian pemerintah Indonesia akan isu perkembangan pembangunan manusia kini semakin baik. Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (*fiscal gap*) dan memacu percepatan pembangunan di daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Dengan adanya DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia secara lebih baik.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2013” ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kondisi, posisi dan perkembangan pembangunan manusia serta komponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain dan periode sebelumnya.

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2013. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antar waktu serta wilayah, data disajikan dari tahun 2011-2013 untuk membandingkan dengan kondisi sebelumnya serta disajikan menurut kabupaten/kota.

Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi umum pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2011-2013.
2. Menyajikan analisis indeks pembangunan manusia dan perkembangannya serta komponen-komponen indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat tahun 2011-2013.
3. Menyajikan analisis disparitas pembangunan manusia antar wilayah di Provinsi Papua Barat tahun 2013.

1.3. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

- Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat secara berkesinambungan.
- Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi dalam publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manusia pada tahap pembangunan selanjutnya.
- Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2013 disusun menjadi beberapa bab dan diorganisasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat. Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM dan metode penyusunan indeks. Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghitungan IPM.

Bab III Kondisi Umum Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat memberikan gambaran secara lengkap hasil-hasil pembangunan manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Bab selanjutnya yakni Bab IV menganalisis perkembangan komponen IPM 2011-2013. Pembahasan diperluas dengan melakukan komparasi pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat dengan nasional, pembahasan perkembangan IPM dan reduksi *shortfall*.

Bab V mengulas disparitas IPM antar wilayah. Didalamnya dapat diketahui bagaimana posisi relatif IPM kabupaten/kota di tingkat provinsi dan posisi relatif provinsi di tingkat nasional dari peringkat capaian IPM kabupaten/kota menurut peringkat provinsi dan nasional. Analisis IPM

diperdalam dengan melakukan perbandingan keberhasilan ekonomi dan pembangunan manusia dalam analisis kuadran.

Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang berisi ringkasan dari paparan pada Bab III dan bab VI sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari penyusunan publikasi ini.

<http://papuabarat.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1 Sejarah Penghitungan IPM

IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan pada tahun 1996. Laporan pembangunan manusia tahun 1996 memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan 1993. Cakupan laporan pembangunan manusia terbatas pada level provinsi. Mulai tahun 1999, informasi pembangunan manusia telah disajikan sampai level kabupaten/kota.

IPM Provinsi Papua Barat mulai dihitung sejak tahun 2005. Provinsi Papua Barat merupakan provinsi pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Provinsi Irian Jaya Barat memenuhi kelengkapan syarat sebuah pemerintahan provinsi paska pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang menetapkan Abraham Octavianus Atururi (Brigjen Marinir Purn.) dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed sebagai gubernur dan wakil gubernur yang dilantik pada tanggal 26 Juli 2006. Publikasi IPM ini mengawali penerbitan rutin buku IPM Provinsi Papua Barat.

2.2 Sumber Data

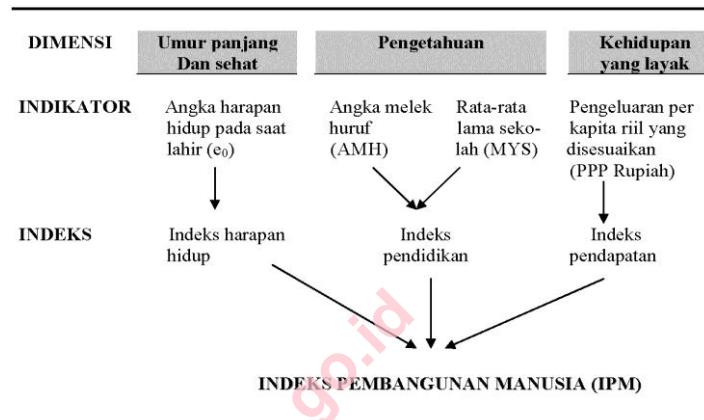
Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah:

- ✚ Susenas Kor : digunakan untuk menghitung indikator seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan penghitungan pengeluaran per kapita.
- ✚ Susenas Modul Konsumsi : digunakan untuk menghitung daya beli masyarakat Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada 27 komoditas.
- ✚ Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2014 : digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan manusia pada kurun waktu 2011 – 2013.
- ✚ PDRB Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 : digunakan untuk melihat PDRB kabupaten/kota, PDRB Provinsi Papua Barat, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita sebagai gambaran pembangunan perekonomian.

2.3 Metode Penyusunan Indeks

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat (lama hidup sehat) diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) yang telah disesuaikan. Penjelasan rinci metode penghitungan masing-masing komponen IPM sebagai berikut:

Gambar 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia



Angka harapan hidup pada saat lahir

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur. Adapun langkah-langkah penghitungan angka harapan hidup adalah:

- Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, dan 45 – 49 tahun.
- Menghitung rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin menurut kelompok umur pada huruf a di atas.
- Input rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup pada huruf b pada paket program *MORTPACK* sub program *CEBCS*.
- Gunakan metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup saat lahir. Referensi waktu yang digunakan 3 atau 4 tahun sebelum survei.

- e. Untuk mendapatkan angka harapan hidup pada tahun 2011 - 2013 dilakukan dengan ekstrapolasi.

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang dapat membaca huruf latin atau huruf lainnya. Adapun langkah-langkah penghitungan angka melek huruf adalah:

- a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- b. Menghitung jumlah penduduk 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
- c. Membagi jumlah penduduk pada huruf b dengan jumlah penduduk pada huruf a dikalikan 100.

Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Langkah-langkah penghitungan rata-rata lama sekolah sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah penduduk berumur 15 tahun atau lebih.
- b. Melakukan konversi variabel tingkat pendidikan yang ditamatkan ke variabel lama sekolah.
- c. Menghitung rata-rata lama sekolah dengan melakukan agregat data menggunakan fungsi *mean*. Untuk menghitungnya dapat menggunakan paket Program SPSS.



Paritas Daya Beli yang Disesuaikan

Langkah-langkah menghitung paritas daya beli adalah:

- Menghitung pengeluaran per kapita, y .
- Menghitung pengeluaran per kapita yang dimark up 20 persen, $y_1 = y \times (1,20)$.
- Menghitung pengeluaran riil, y_2 dengan membagi y_1 dengan indeks harga konsumen.
- Menghitung paritas daya beli dari 27 komoditi dengan persamaan:

$$PPP \text{ per unit} = \frac{\sum_{j=1}^{27} E_{ij}}{\sum_{j=1}^{27} (P_{11,j}^* \cdot Q_{i,j})}$$

PPP = Paritas daya beli,

E_{ij} = Pengeluaran komoditas ke $-j$ di Kabupaten ke- i Provinsi Papua Barat,

$P_{0,j}$ = Harga komoditas ke $-j$ di Jakarta Selatan,

$Q_{i,j}$ = Volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten ke- i Provinsi Papua Barat.

Khusus komoditi rumah sewa, unit kualitasnya ditentukan berdasarkan indeks kualitas rumah. Indeks kualitas rumah dihitung berdasarkan kualitas dan fasilitas rumah tinggal dari delapan variabel. Kedelapan variabel ini diberi skor berdasarkan karakteristik yang sesuai (lihat lampiran 3).

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan skor dibagi dengan delapan. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga menempati rumah berlantai tanah (0), berdinding kayu (0), luas lantai per kapita 18 meter

per segi (1), beratap seng (0), menggunakan penerangan listrik (1), minum dari air hujan (0), jamban milik sendiri (1). Maka skor indeks kualitas rumah adalah $4/8 = 0,50$. Artinya, kuantitas rumah yang dikonsumsi rumah tangga tersebut adalah 0,50 unit.

- e. Menghitung $y_3 = y_2/PPP$.
- f. Mengurangi y_3 dengan formula Atkinson sebagai berikut:

Formula Atkinson

$$C_{(i)}^* = \begin{cases} C_{(i)} & \text{jika } C_{(i)} < Z \\ Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} & \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} & \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\ Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} & \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z \end{cases}$$

Dengan:

$C_{(i)}$ = PPP dari pengeluaran riil per kapita, y_3 .

Z = Batas pengeluaran yang ditetapkan, biasanya garis kemiskinan.

📌 Menghitung IPM

a. Setelah masing-masing komponen IPM dihitung, maka masing-masing indeks dihitung dengan persamaan:

Dengan:

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{ij} - X_{(1-min)})}{(X_{(i-maks)} - X_{(i-min)})}$$

$X_{(i,j)}$ = Indeks komponen ke- i dari kabupaten ke - j ;

$X_{(i-min)}$ = Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-maks)}$ = Nilai maksimum dari X_i

Nilai maksimum dan minimum dari masing-masing indeks tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan <i>Combined Gross Enrollment Ratio</i>
Daya Beli	732.720 ^a	300.000 360.000 ^b	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan yang baru

b. Menghitung indeks pengetahuan :

$$X_2 = \frac{2}{3}(X_{21}) + \frac{1}{3}(X_{22})$$

Dengan:

X_{21} = Indeks Melek Huruf

X_{22} = Indeks Lama Sekolah

c. Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \frac{1}{3} \sum_j \text{Indeks } X_{(i)}$$

Dengan Indeks $X_{(i)}$ = Indeks komponen IPM ke i ;

$i = 1$ (Indeks angka harapan hidup),

2 (Indeks pendidikan),

3 (Indeks daya beli).

📌 Menghitung Reduksi *Shortfall* (r) : digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

$$r = \left[\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{100 - IPM_t} \right]^{1/n}$$

Dengan:

r = reduksi *shortfall*,

IPM_{t+n} = IPM pada tahun ($t + n$)

IPM_t = IPM pada tahun (t)

2.4 Besaran Skala IPM

IPM suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Keempat kelompok itu adalah (UNDP, 2009):

- 🚦 IPM Sangat Tinggi apabila IPM sama dengan 90,00 atau lebih
- 🚦 IPM Tinggi apabila IPM antara 80,00 – 89,99
- 🚦 IPM Menengah apabila IPM antara 50,00 – 79,99
- 🚦 IPM Rendah apabila IPM kurang dari 50,00

BAB III

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT 2013

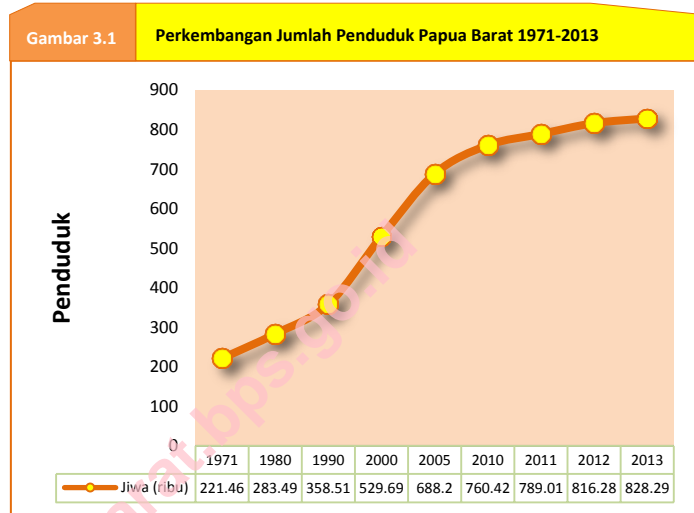
3.1 Kependudukan

Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat berdaya guna tanpa adanya peranan dari manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam menangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban dan menimbulkan masalah sosial bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

Diperlukan peranan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan berorientasi pada pembangunan berbasis kependudukan. Berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan terutama yang berkaitan dengan masyarakat luas dengan mempertimbangkan indikator-indikator demografi dan kependudukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang cepat. Papua Barat sebagai provinsi termuda keempat di Indonesia,

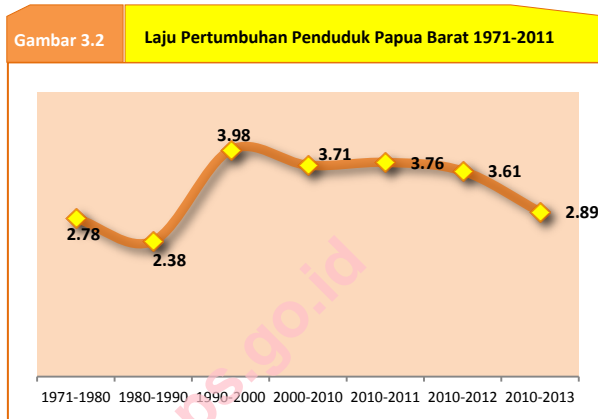
merupakan salah satu dari 34 provinsi yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2013

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 mencapai 828.293 jiwa. Dibandingkan dengan pada waktu pertama kali diadakan Sensus Penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Provinsi Papua Barat yang saat itu masih menjadi bagian wilayah dari Provinsi Papua berjumlah 221,4 ribu jiwa. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat terjadi antara tahun 1990-2000 dan tahun 2000-2005. Penduduk Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan hingga mencapai 529,69 ribu jiwa pada kondisi Sensus Penduduk tahun 2000. Pada saat pendataan SUPAS 2005 penduduk Papua Barat telah mencapai 688,2 ribu jiwa, kemudian berdasarkan hasil

Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Papua Barat berjumlah menjadi 760.422 jiwa.



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2013

Pertumbuhan penduduk rata-rata Papua Barat berada pada kisaran 2-4 persen per tahun. Selama tahun 1971-2010, Papua Barat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,21 persen per tahun. Sementara pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun antar Sensus Penduduk 1971-1980, 1980-1990, 1990-2000, dan 2000-2010 sebesar 2,78 persen; 2,38 persen; 3,98 persen dan 3,71 persen. Laju pertumbuhan penduduk mulai mengalami kecenderungan melambat setelah tahun 2000. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk tahun 2000 hingga kondisi tahun 2010 sebesar 3,71 persen, laju pertumbuhan mengalami perlambatan pada periode 2010-2013 yaitu sebesar 2,89 persen.

Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi (diatas pertumbuhan penduduk nasional 2000-2010, yaitu 1,49) ini terjadi mengingat Papua Barat adalah sebuah provinsi muda dan dalam proses membangun. Diperkirakan masih tingginya angka pertumbuhan penduduk ini salah

satunya karena faktor migrasi (migrasi risen Papua Barat tertinggi kedua di Indonesia, yaitu 4,8). Namun pertumbuhan penduduk tidak hanya dipengaruhi oleh faktor migrasi saja tetapi juga faktor fertilitas dan mortalitas. Dengan semakin baiknya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini berangsur-angsur mulai mengalami perlambatan seiring dengan menurunnya tingkat fertilitas dan mortalitas.

Meskipun pertumbuhan penduduk tergolong cepat, namun Papua Barat memiliki sebaran penduduk yang tidak merata antar wilayah. Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 211.840 jiwa dan 150.179 jiwa atau sekitar 25,58 dan 18,13 persen dari total penduduk Papua Barat. Atau dengan kata lain, jumlah penduduknya hampir setengah dari penduduk Papua Barat. Sementara jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Tambrauw hanya sebesar 13.376 jiwa (1,61 persen dari total penduduk Papua Barat).

Menurut luas wilayah, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Papua Barat, yaitu 20.840,83 Km², namun kepadatan penduduknya hanya 2,72 atau 3 jiwa/Km², demikian pula dengan Kabupaten Kaimana, luas wilayahnya terbesar kedua di Papua Barat, namun kepadatan penduduknya hanya 3,15 atau 3 jiwa per Km². Sementara Kota Sorong yang luas wilayahnya paling kecil diantara kabupaten lainnya justru memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi, yaitu 322,61 penduduk/Km². Padatnya penduduk Kota Sorong tak lepas dari motif ekonomi yang menjadi daya tariknya. Perusahaan minyak yang telah didirikan pada zaman Pemerintahan Belanda membuat daerah ini lebih maju dan menjadi awal daya tarik dibandingkan dengan daerah

lainnya. Kota Sorong adalah pintu gerbang bagi daerah lainnya di Papua Barat.

Berbeda dengan Kota Sorong, Kabupaten Manokwari adalah kota tua yang awalnya sulit untuk berkembang. Namun setelah Provinsi Papua Barat menjadi daerah otonom, dimekarkan dari provinsi induknya, Provinsi Papua, dan diadakannya Kabupaten Manokwari sebagai ibukota provinsi, wilayah ini menjadi daerah 'baru' yang mulai berkembang. Sebagai pusat pemerintahan di Papua Barat, Kabupaten Manokwari mulai menata diri dan tumbuh menjadi daerah ramai dan padat penduduk.

Secara agregat Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah 97.024,27 Km² dan jumlah penduduk 828.293 jiwa termasuk sebagai provinsi yang kepadatan penduduknya paling rendah, yakni hanya 8,54 jiwa/Km². Besaran tersebut mempunyai makna rata-rata hanya terdapat sekitar delapan orang penduduk dalam setiap Km².

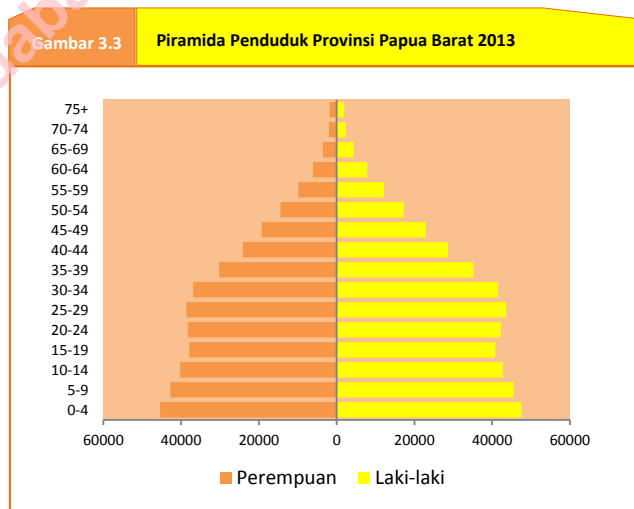
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk, Persentase Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk/Km² Papua Barat Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk **)	Persentase Jumlah Penduduk	Luas Wilayah*)	Kepadatan Penduduk/Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	70 902	8,56	11 036,48	6,42
Kaimana	51 100	6,17	16 241,84	3,15
Teluk Wondama	28 534	3,44	3 959,53	7,21
Teluk Bintuni	56 597	6,83	20 840,83	2,72
Manokwari	150 179	18,13	8 664,76	17,33
Sorong Selatan	41 085	4,96	3 946,94	10,41
Sorong	76 669	9,26	7 415,29	10,34
Raja Ampat	44 568	5,38	8 034,44	5,55
Tambrauw	13 376	1,61	5 179,65	2,58
Maybrat	35 798	4,32	5 461,69	6,55
Manokwari Selatan	20 916	2,53	2 812,44	7,44
Pegunungan Arfak	26 729	3,23	2 773,74	9,64
Kota Sorong	211 840	25,58	656,64	322,61
Papua Barat	828 293	100,00	97 024,27	8,54

sumber: *) Berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2008, dan UU pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak

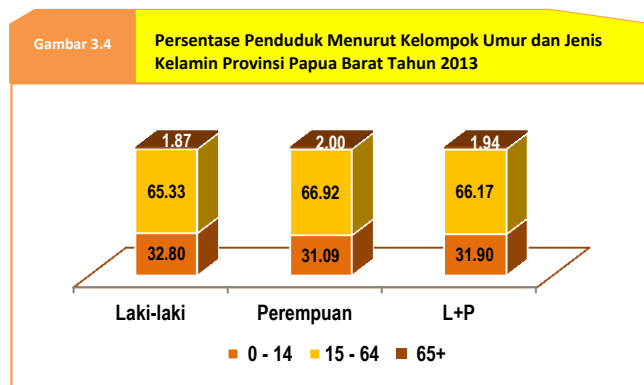
**) Proyeksi Penduduk Papua Barat 2013

Struktur penduduk Papua Barat dapat diketahui dari komposisi penduduk menurut kelompok umur. Dalam Gambar 3.3, piramida penduduk menggambarkan struktur penduduk yang dibagi ke dalam kelompok umur. Dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur tersebut piramida Papua Barat termasuk dalam piramida *ekspansive* atau muda. Hal ini tampak dari bentuk piramida penduduk dimana penduduk lebih terdistribusi ke dalam kelompok umur usia muda (kelahiran tinggi) atau piramida mempunyai alas yang lebar. Selain itu dilihat dari besarnya median umur, Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 tergolong pada penduduk usia *intermediate* atau menengah karena memiliki median umur 24,42 tahun (Koreksi umur median Papua Barat 2011 dan 2012 yaitu menjadi 23,60 dan 23,30). Sesuai dengan kriteria penduduk usia menengah adalah bila median umur di suatu daerah berada pada rentang 20-30 tahun.



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2013

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut, maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga dan melakukan kegiatan lainnya). Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2013

Salah satu implikasi lain dari struktur umur muda adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk menanggung hidup penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif. Demikian pula sebaliknya.

Menurut para ahli demografi, sekitar tahun 2020-2030 nanti Indonesia akan mengalami Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah sebuah kondisi dimana rasio ketergantungan mencapai nilai terendah dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Dengan kata lain jumlah penduduk usia produktif berada pada jumlah yang paling maksimum. Bagaimana dengan Papua Barat?. Bila dilihat dari struktur umurnya dalam piramida penduduk, maka keadaan itu dapat terjadi dalam beberapa tahun kedepan. Namun perlu diperhatikan bahwa bonus demografi seperti pedang bermata dua, penduduk usia produktif besar tetapi menganggur justru akan menimbulkan masalah multidimensional.

Gambar 3.4 memberikan informasi bahwa persentase penduduk produktif dan non produktif baik itu secara agregat maupun gender menunjukkan kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki maupun perempuan serta total penduduk menunjukkan distribusi yang hampir seragam. Besarnya rasio ketergantungan Papua Barat mencapai 55,90 persen. Artinya dari 100 orang yang masih produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban hidup sekitar 55-56 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun keatas).

3.2 Kondisi Kesehatan

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, diwujudkan melalui penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk diperhatikan. Disamping itu, indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pembangunan manusia dalam bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak hingga dewasa. Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat pesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

3.2.1 Sarana Kesehatan

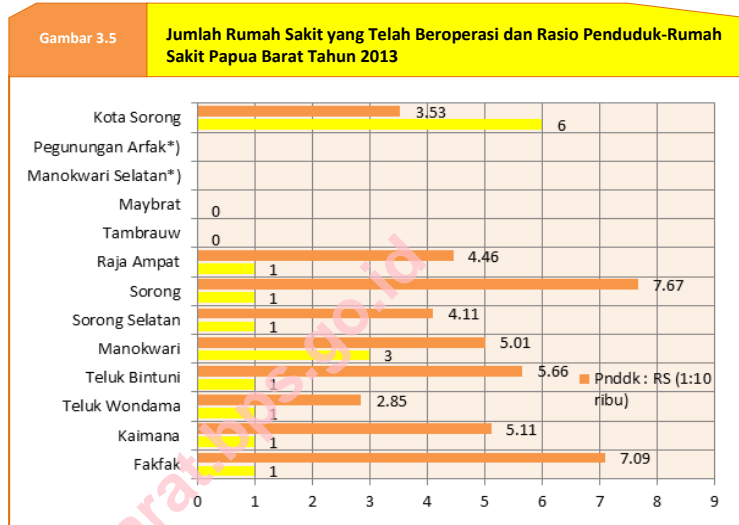
a. Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat (universal akses) menjadi prioritas utama. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan antara lain rasio fasilitas kesehatan per penduduk.

▪ Rumah Sakit

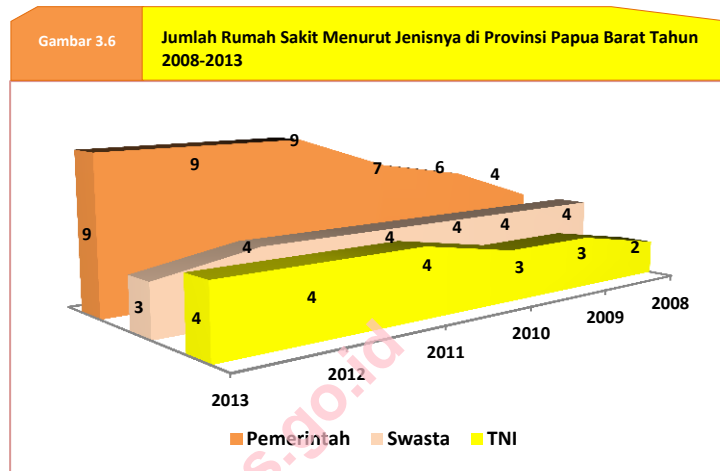
Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menyediakan berbagai pelayanan kesehatan. Distribusi penyebaran rumah sakit diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Gambar 3.5, ditunjukkan bahwa dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat pada tahun 2013, belum semua

kabupaten memiliki fasilitas rumah sakit, seperti di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat (Data Rumah Sakit), 2013
) data masih tergabung dengan data induk

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2013, ketersediaan rumah sakit milik pemerintah mengalami peningkatan jumlah dari 4 unit rumah sakit di tahun 2007 menjadi 9 unit rumah sakit, sedangkan rumah sakit TNI mengalami penambahan dari 2 unit pada tahun 2007 menjadi 4 unit rumah sakit di tahun 2011. Rumah sakit swasta dari tahun 2007 hingga 2012 tidak mengalami perubahan dalam segi kuantitas. Sedangkan pada tahun 2013, rumah sakit swasta menurun menjadi 3 unit. Jika dibandingkan jumlah penduduk, maka pada tahun 2013 dapat dikatakan bahwa 16 rumah sakit di Papua Barat harus melayani 828.293 penduduk. Hal ini juga berarti bahwa satu rumah sakit melayani sebanyak 51.768 penduduk. (Lihat Gambar 3.6).



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2013

▪ Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Posyandu

Selain rumah sakit, sarana kesehatan lainya yang ikut berperan dalam menyetatkan masyarakat antara lain puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan polindes yang dimanfaatkan sebagai fasilitas kesehatan yang terjangkau baik dalam segi biaya maupun letaknya yang menyebar jika dibandingkan dengan rumah sakit. Puskesmas di Papua Barat terdistribusi paling banyak di Kabupaten Manokwari, yaitu 24 puskesmas, sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Tambrauw, yaitu lima buah puskesmas.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang paling banyak ada di Kabupaten Manokwari dibandingkan dengan daerah lain, yaitu terdapat 24 puskesmas, 53 Puskesmas Pembantu, 43 polindes, dan 250 posyandu. Mengingat Kabupaten Manokwari dan kabupaten lainnya di

Papua Barat memiliki kondisi geografis yang relatif sulit dengan infrastruktur angkutan darat yang belum seluruhnya terhubung dengan baik, serta biaya transportasi yang mahal, maka salah satu pilihan yang tepat adalah dengan *mobile clinic* seperti yang diagendakan dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua Barat.

Tabel 3.2 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Posyandu di Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fak-Fak	9	35	53	132
Kaimana	8	49	27	87
Teluk Wondama	6	32	18	75
Teluk Bintuni	20	20	13	118
Manokwari	24	52	43	250
Sorong Selatan	13	47	15	69
Sorong	17	34	26	130
Raja Ampat	19	43	29	36
Tambrau	5	11	4	4
Maybrat	14	25	6	84
Manokwari Selatan *)	-	-	-	-
Pegunungan Arfak *)	-	-	-	-
Kota Sorong	6	31	5	89
Papua Barat	141	379	239	1074

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2013

*) : data masih tergabung dengan data induk

Lain halnya dengan Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, sebagai kota besar di Papua Barat hanya memiliki 6 Puskesmas, 31 Puskesmas Pembantu, 5 polindes dan 89 posyandu. Dilihat dari jumlah penduduk, Kota Sorong memiliki penduduk sebanyak 211.840 penduduk di tahun 2013 yang tidak jauh beda dengan Kabupaten Manokwari yang berjumlah 150.179 jiwa. Sedikitnya fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Pustu,

dan Posyandu tidak terlalu bermasalah, hal ini dikarenakan Kota Sorong memiliki rumah sakit dalam jumlah yang memadai sebagai sarana kesehatan yang dipilih oleh masyarakat untuk berobat. Disamping itu kondisi wilayah yang terkonsentrasi membuat penduduk akan dengan mudah menemukan tempat-tempat pelayanan kesehatan baik berupa rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu maupun polindes.

b. Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau tenaga medis sebagai subjek yang melakukan pengobatan dan penanganan medis. Distribusi tenaga medis di Papua Barat dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Kabupaten/Kota (1)	Dokter			Jumlah (5)
	Ahli (2)	Umum (3)	Gigi (4)	
Fakfak	4	10	2	16
Kaimana	1	2	2	5
Teluk Wondama	2	2	-	4
Teluk Bintuni	3	-	1	4
Manokwari	10	10	-	20
Sorong Selatan	4	2	1	7
Sorong	12	3	-	15
Raja Ampat	4	-	-	4
Tambrau	-	-	-	-
Maybrat	-	-	-	-
Manokwari Selatan*)	-	-	-	-
Pegunungan Arfak*)	-	-	-	-
Kota Sorong	8	18	8	34
Papua Barat	48	47	14	109

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2013

*) data masih tergabung dengan data induk

Berdasarkan Tabel 3.3, sebaran tenaga dokter yang belum merata di Papua Barat, terutama di kabupaten pemekaran. Diketahui bahwa jumlah dokter yang paling banyak ada di Kota Sorong yaitu sebanyak 34 dokter, sedangkan Manokwari sebagai ibukota provinsi tenaga dokter yang dimiliki hanya sebanyak 20 orang dengan rincian 10 dokter ahli dan 10 dokter umum. Sementara jumlah dokter di kabupaten pemekaran rata-rata kurang dari 30 orang per kabupaten. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kesehatan tidak optimal. Disamping itu, dokter dan tenaga kesehatan lainnya cenderung lebih terkonsentrasi di kabupaten lama yang sudah ramai dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Untuk wilayah-wilayah terpencil banyak ditemui terdapat fasilitas kesehatan tetapi tidak ada tenaga kesehatan yang *standby* disana. Sebagai contoh adalah Kabupaten Fakfak, Manokwari, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong memiliki tenaga dokter yang terbanyak, masing-masing memiliki 16, 20, 15, dan 34 orang dokter. Keterbatasan tenaga medis ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, mengingat jumlah dokter tersebut termasuk dokter dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT), mereka hanya memiliki masa bakti hanya sekitar enam bulan, selebihnya setelah masa bakti berakhir mereka dapat kembali ke daerahnya masing-masing, kecuali jika diperpanjang masa PTT-nya.

Jumlah dokter dalam suatu wilayah tertentu menentukan tingkat pelayanan kesehatan. Rasio antara jumlah dokter yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan idealnya proporsional. Semakin besar rasio penduduk terhadap dokter maka semakin banyak penduduk yang harus dilayani. Implikasinya adalah semakin besar jumlah penduduk yang akan tidak terlayani atau semakin sulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter.

Jika diperhatikan dari jumlah penduduk Papua Barat tahun 2013 dan jumlah dokter yang tersedia, maka rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter di Papua Barat adalah sebesar 7.599, atau mengandung makna bahwa satu dokter rata-rata melayani sekitar 7.599 orang.

Tabel 3.4 Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter *)	Rasio Penduduk / Dokter
(1)	(2)	(3)	(4)
Fakfak	70 902	16	4431
Kaimana	51 100	5	10220
Teluk Wondama	28 534	4	7134
Teluk Bintuni	56 597	4	14149
Manokwari	150 179	20	7509
Sorong Selatan	41 085	7	5869
Sorong	76 669	15	5111
Raja Ampat	44 568	4	11142
Tambora	13 376	-	-
Maybrat	35 798	-	-
Manokwari Selatan*)	20 916	-	-
Pegunungan arfak*)	26 729	-	-
Kota Sorong	211 840	34	6231
Papua Barat 2013	828 293	109	7599

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2013

*) : data masih tergabung dengan data induk

Jumlah dokter di Papua Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, distribusinya pun belum tersebar dengan alokasi yang baik. Data sementara menunjukkan rasio penduduk terhadap jumlah dokter tahun 2013 meningkat menjadi 7.599 dibandingkan dengan 3.459 ditahun 2012, jika dilihat periode beberapa tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan rasio. Artinya terjadi *coverage* yang lebih buruk

dalam hal akan tertanganinya penduduk dengan peningkatan jumlah dokter dimana jumlah penduduk juga mengalami peningkatan. Asumsi akan tertanganinya penduduk oleh dokter adalah semua penduduk memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kesempatan pengobatan dari tenaga dokter tanpa memperhatikan apakah penduduk tersebut berada pada wilayah yang sulit, kemampuan ekonomi yang rendah atau faktor-faktor lain yang menghambat seseorang untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Faktanya masih banyak penduduk Papua Barat yang hidup di wilayah terpencil dimana tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan, rasio tersebut setidaknya memberikan gambaran kasar bahwa ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat mencerminkan bagaimana kondisi kecukupan tenaga kesehatan di Papua Barat.

Rasio penduduk terhadap dokter tertinggi berada di Kabupaten Teluk Bintuni, dimana seorang dokter harus melayani sekitar 14.149 penduduk. Besarnya rasio tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Fakfak yang memiliki rasio terkecil yaitu sebesar 4.431 penduduk per seorang dokter. Kabupaten Raja Ampat juga memiliki rasio penduduk terhadap dokter tertinggi kedua. *Coverage* tanggungan seorang dokter di Kabupaten Raja Ampat memang besar, ditambah dengan kondisi geografisnya yang merupakan wilayah kepulauan akan semakin menyulitkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Sedangkan hanya Kabupaten Tambrauw dan Maybrat yang tidak memiliki dokter dan memiliki karakter wilayah terpencil dengan akses transportasi yang sulit pula sehingga tidak seluruh wilayah tersebut dapat terjangkau pelayanan kesehatan. Dampaknya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh dokter harus menuju kabupaten terdekat yang memiliki

dokter yaitu Kabupaten Sorong. Terpenuhinya kebutuhan penduduk akan dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak hanya masalah jumlah, namun juga distribusinya merata disetiap kabupaten sampai ke wilayah terpencil sekalipun.

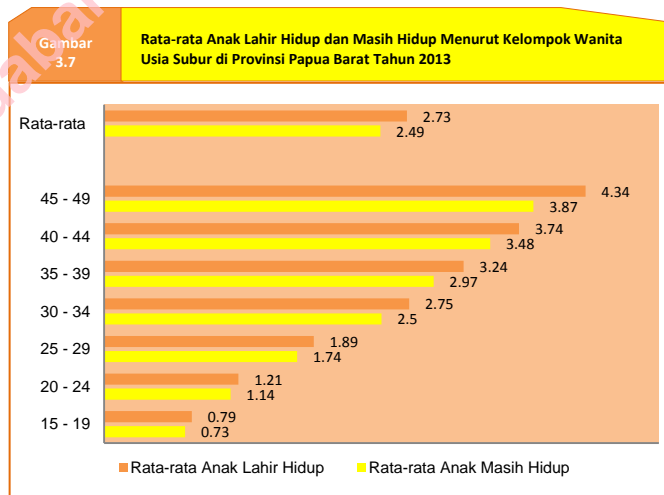
3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat

Selain dari sarana kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dijadikan sebagai indikator untuk melihat indeks pembangunan manusia dibidang kesehatan mengingat manusia sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat (universal akses) demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Objek yang dijadikan perhatian dalam pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah kesehatan pada balita. Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kesehatan pada balita dapat dilihat dari tingkat kematian bayi, penolong kelahiran, dan imunisasi pada balita.

Tingkat pesakitan atau banyaknya keluhan kesehatan menunjukkan seberapa besar kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Semakin banyak keluhan kesehatan yang terjadi dalam masyarakat maka tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Kesehatan pada masyarakat juga dipengaruhi oleh pola hidup sehat yang dilakukan. Salah satunya adalah sistem sanitasi dalam masyarakat. Penggunaan air bersih dan sistem pembuangan tinja dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan.

➤ Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi seringkali dijadikan sebagai indikator derajat kesehatan suatu daerah. Untuk menghasilkan AKB yang akurat diperlukan data dasar yang baik seperti Sensus Penduduk. Namun bila data dasar tersebut sulit tersedia atau jaraknya terlalu jauh dengan tahun referensi maka dapat dilakukan dengan pendekatan lain. Salah satunya adalah AKB didekati dari data jumlah anak yang lahir hidup dengan jumlah anak yang masih hidup. Berdasarkan data Susenas 2013, selisih tertinggi dari rata-rata anak lahir hidup dengan rata-rata anak masih hidup berada pada kelompok usia wanita antara umur 45-49 tahun yaitu sebesar 0,47 poin. Jadi resiko kematian terbesar berada kelompok wanita yang berada pada usia 45-49 tahun. Sedangkan selisih dari rata-rata anak lahir hidup dan masih hidup secara keseluruhan hanya 0,24 poin.



Sumber : Susenas 2013

➤ **Penolong Kelahiran**

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi berpengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e_0) yang digunakan dalam salah satu dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Sementara itu salah satu aspek penentu besarnya angka kematian bayi adalah penolong kelahiran. Penolong kelahiran sebenarnya tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi namun juga angka kematian ibu sebagai resiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara probabilitas keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam resiko besar sebuah kelahiran. Penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya selama ini dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan dukun atau famili. Dalam analisis ini digunakan penolong pertama pada kelahiran mengingat pada proses ini sangat mengandung resiko. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa 45,89 persen penolong kelahiran balita dilakukan oleh bidan, meskipun kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 50,37 persen. Sementara penolong kelahiran tenaga medis lain sebesar 2,62 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 3,96 persen. Sedangkan penolong kelahiran oleh dokter mengalami peningkatan 1,52 persen menjadi 16,76 persen di tahun 2013. Meskipun kelahiran ditolong bidan sedikit mengalami penurunan, namun secara umum masyarakat masih dominan (lebih dari dua per tiga) dalam menggunakan jasa tenaga kesehatan terlatih dibandingkan dengan penolong kelahiran tidak terlatih.

Fenomena penolong kelahiran dengan bantuan dukun secara umum memang masih terjadi, dan pada beberapa kabupaten persentasenya masih relatif tinggi. Sebagai contoh adalah Kabupaten Raja Ampat, sebesar 51,21 persen masyarakatnya masih menggunakan jasa dukun beranak dalam menolong proses persalinan. Sedangkan di beberapa kabupaten, sekitar sepertiga proses persalinan masih ditolong oleh tenaga non medis.

Tabel 3.5 Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Pertama Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Kabupaten/kota	Penolong Waktu Lahir					
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lain	Dukun	Famili	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	12,79	56,88	0,48	27,04	2,80	N.A
Kaimana	10,84	49,26	1,26	11,15	27,30	0,19
Teluk Wondama	5,82	34,98	0,14	10,35	48,72	N,A
Teluk Bintuni	9,89	54,46	0,10	21,59	13,06	0,91
Manokwari	31,23	39,39	N.A	5,08	23,01	1,28
Sorong Selatan	8,15	26,94	27,00	32,92	4,18	0,82
Sorong	10,53	48,65	2,27	26,39	12,17	N.A
Raja Ampat	2,56	26,01	2,89	51,21	17,33	N.A
Tambrau	0,44	29,56	4,88	44,03	21,09	N.A
Maybrat	4,35	29,07	7,90	19,82	37,72	1,13
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-
Kota Sorong	19,21	64,39	0,27	11,38	4,75	N.A
Papua Barat 2013	16,76	45,89	2,62	17,85	16,38	0,51
Papua Barat 2012*	15,24	50,37	3,96	14,34	15,49	0,60
Papua Barat 2011*	13,10	47,30	3,83	20,86	14,16	0,66

Sumber : Susenas 2011-2013

*Angka dikoreksi, sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat 2011 dan 2012

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penolong kelahiran pertama di Papua Barat paling utama dilakukan oleh bidan. Selain mayoritas proses persalinan tertangani oleh bidan, dominasi penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya) masih terlihat, ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa tenaga kesehatan terlatih masih baik, sehingga resiko kematian bayi maupun ibu dapat ditekan, dan tentunya akan menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

Di lain sisi, dengan masih realtif tingginya penolong persalinan memakai tenaga non medis, terutama di daerah terpencil dan terisolir, perlu lebih digiatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa tenaga medis dalam proses persalinan. Dan untuk mendukung aksi tersebut tentunya diharapkan ketersediaan tenaga medis, terutama bidan, sampai dengan level kecamatan dan desa dapat terpenuhi atau program *mobile clinic* ditambah timnya dan semakin diaktifkan.

➤ **Imunisasi**

Angka kematian bayi sangat berhubungan erat dengan proses kelahiran, setelah itu masih banyak tahap yang harus dilalui seseorang untuk tetap *survive* terutama selama tahap usia balita. Untuk menjamin kesehatan balita yang rentan dengan ancaman penyakit, sangat perlu diberikan imunisasi agar kekebalan pada tubuh balita dapat terbentuk. Imunisasi yang diberikan pada balita diantaranya adalah imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B. Pemberian imunisasi sebagai salah satu cara untuk mencegah terserang penyakit dan atau menyebabkan kematian. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa di tahun 2013,

persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi untuk semua jenis imunisasi yaitu BCG (88,79 %); DPT (86,43 %); Polio (86,98 %); campak /Morbili (76,73 %); dan sebanyak 82,87 persen imunisasi Hepatitis B.

Tingkat kesadaran tertinggi terdapat pada jenis imunisasi BCG, sedangkan kesadaran imunisasi terendah adalah pada jenis penggunaan imunisasi campak/morbili. Kesadaran dalam mengimunisasi balita sangat penting perannya dalam tumbuh kembang balita. Sebenarnya tidak hanya kesadaran dalam mengimunisasi balita saja yang harus diperhatikan oleh para orang tua, namun juga imunisasi dasar lengkap harus dilakukan.

Tabel 3.6 Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2011- 2013

Kabupaten/kota	Jenis Imunisasi				
	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	96,49	95,77	95,59	89,19	92,84
Kaimana	91,88	90,69	90,69	77,39	88,23
Teluk Wondama	76,86	67,78	66,85	55,70	63,43
Teluk Bintuni	93,33	97,69	98,39	90,79	98,39
Manokwari	80,33	75,94	76,98	65,70	72,77
Sorong Selatan	89,87	90,29	87,26	78,55	84,13
Sorong	95,24	94,21	93,46	86,85	88,45
Raja Ampat	90,90	85,11	95,45	78,35	82,90
Tambrauw	46,56	54,45	55,21	42,50	48,75
Maybrat	91,02	86,30	90,07	81,65	82,98
Kota Sorong	95,75	93,58	92,05	81,99	88,67
Papua Barat 2013	88,79	86,43	86,98	76,73	82,87
Papua Barat 2012*	91,21	88,42	89,37	77,81	85,62
Papua Barat 2011*	91,71	88,56	89,21	86,60	85,52

Sumber: Susenas 2011-2013

*Angka dikoreksi, sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat 2011 dan 2012

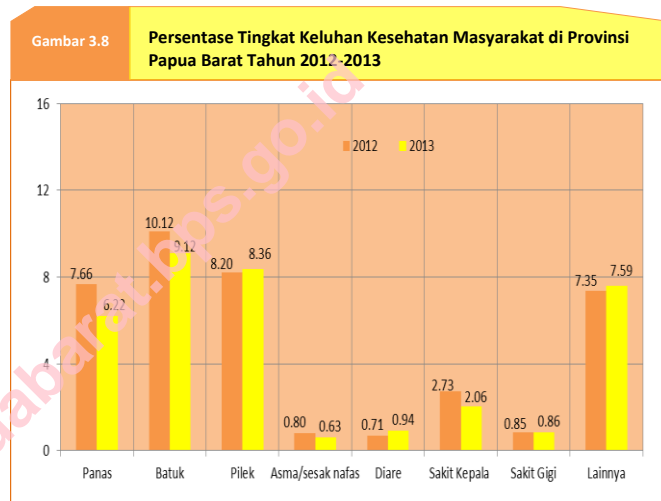
Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk bayi dibawah satu tahun. Imunisasi lengkap tersebut yaitu: (1) Hepatitis-B, umur pemberian kurang dari 7 hari sebanyak satu kali; (2) BCG, umur pemberian satu bulan sebanyak satu kali; (3) DPT, umur pemberian dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan sebanyak 3 kali; (4) Polio, umur pemberian satu, dua, tiga, dan empat bulan sebanyak empat kali; (5) Campak, umur pemberian sembilan bulan sebanyak satu kali.

Perlu diketahui bahwa informasi pada tabel ini tidak dapat menampilkan apakah balita yang bersangkutan telah mendapatkan imunisasi secara lengkap, tetapi hanya menampilkan balita yang telah mendapatkan imunisasi. Pemahaman masyarakat tentang pemberian imunisasi lengkap perlu terus digalakkan agar tidak hanya sekedar diberikan imunisasi tetapi imunisasi dasar lengkap.

➤ **Morbiditas/ Tingkat Pesakitan**

Banyaknya keluhan kesehatan digunakan untuk mengukur derajat kesehatan pada masyarakat. Masyarakat dianggap memiliki derajat kesehatan yang semakin tinggi ketika keluhan kesehatan yang dialami semakin rendah. Gambar 3.8 menunjukkan bahwa dua keluhan kesehatan utama yang paling banyak dialami oleh penduduk di Papua Barat dalam dua tahun terakhir adalah batuk dan pilek. Seperti halnya di tahun 2012, keluhan batuk adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat di tahun 2013. Keluhan ini mengalami penurunan menjadi 9,12 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 10,12 persen. Keluhan terbanyak kedua adalah pilek yaitu sebesar 8,36 persen atau cukup meningkat dari kondisi 2013 sebesar 8,20 persen. Keluhan yang paling sedikit dirasakan

adalah asma/sesak nafas dan mengalami penurunan menjadi 0,63 persen di tahun 2013 dari tahun 2012 yaitu sebesar 0,80 persen. Secara umum seluruh keluhan kesehatan di tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012, hal ini memberikan indikasi bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami perbaikan.



Sumber : Susenas 2013

Dua keluhan yang secara umum paling banyak dirasakan (batuk dan panas), paling banyak dikeluhkan oleh penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu sebesar 17,73 persen dan 16,27 persen. Angka tersebut adalah persentase keluhan tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Papua Barat (lihat Tabel 3.7). Kondisi ini berbeda dibandingkan tahun 2012 dimana Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten yang memiliki keluhan kesehatan paling tinggi untuk keluhan batuk dan pilek. Adalah tidak mengherankan kondisi ini terjadi disana karena kabupaten inilah

yang paling minim bila dilihat dari ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada. Keluhan kesehatan secara agregat untuk tingkat provinsi, pada jenis penyakit asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan sakit lainnya masing-masing sebesar 0,63 persen; 0,94 persen; 0,86 persen; dan 7,59 persen.

Tabel 3.7 Persentase Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2013

Kabupaten/Kota	Panas	Batuk	Pilek	Asma/ sesak nafas	Diare	Sakit Kepala Berulang	Sakit Gigi	Lain- nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fakfak	1,64	2,49	2,85	0,12	N.A	0,54	0,28	4,37
Kaimana	6,32	13,85	14,69	0,87	0,72	2,82	2,02	8,69
Teluk Wondama	7,98	10,80	6,93	1,49	1,18	1,63	0,78	6,92
Teluk Bintuni	13,50	17,73	16,27	0,93	2,97	8,81	1,76	14,85
Manokwari	4,87	8,77	8,02	0,65	0,33	0,54	0,22	9,77
Sorong Selatan	5,41	7,73	8,06	0,61	1,91	1,31	0,95	6,08
Sorong	6,80	7,42	4,95	0,38	0,40	1,56	0,12	5,00
Raja Ampat	8,32	11,56	10,01	0,74	0,72	1,72	0,35	5,37
Tambora	3,89	11,08	15,58	0,42	0,05	0,53	0,12	6,67
Maybrat	3,35	3,08	1,78	0,37	1,84	0,90	0,78	1,09
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Sorong	7,32	9,22	8,85	0,64	1,40	3,08	1,88	6,81
Papua Barat 2013	6,22	9,12	8,36	0,63	0,94	2,06	0,86	7,59
Papua Barat 2012	7,66	10,12	8,20	0,80	0,71	2,73	0,85	7,35

Sumber: Susenas 2012-2013

Informasi mengenai keluhan kesehatan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyediaan pelayanan kesehatan seperti persediaan obat-obatan dan tenaga medis maupun paramedis. Tingkat pesakitan juga dapat dilihat dari informasi mengenai lamanya sakit penduduk. Menurut data Susenas 2013 (lampiran 5), sebanyak 54,70 persen

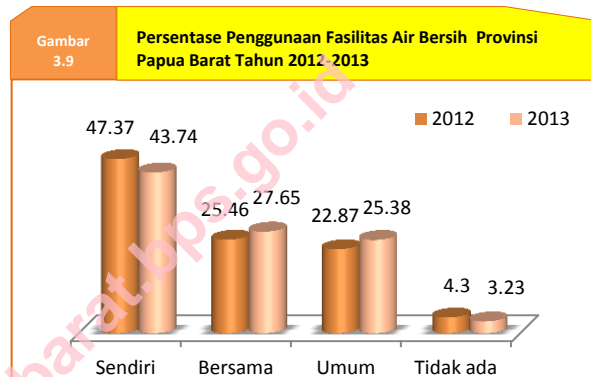
penduduk Papua Barat lama sakit kurang dari 3 hari; 37,73 persen lama sakit 4-7 hari; dan sisanya sebanyak 7,57 persen lama sakit lebih dari 7 hari. Kabupaten Raja Ampat memiliki persentase penduduk terbesar yang mengalami sakit kurang dari 3 hari (77,68%) dan Kabupaten Maybrat memiliki persentase terkecil (20,42%). Sementara untuk lama sakit antara 4-7 hari persentase tertinggi adalah Kabupaten Maybrat yaitu sebesar 70,24 persen dan persentase terendah adalah Kabupaten Raja Ampat yaitu sebesar 21,50 persen. Sedangkan untuk lama sakit lebih dari 7 hari tertinggi berada di Kabupaten Fakfak (14,97%).

Berdasarkan Data Susenas 2013 (lampiran 6) menunjukkan bahwa sebanyak 56,11 persen penduduk di Papua Barat melakukan pengobatan sendiri ketika menderita keluhan sakit yang dilakukan dengan tiga macam yaitu pengobatan tradisional, modern, dan lainnya. Sementara 43,89 persen lainnya melakukan pengobatan ke sarana kesehatan jika mengalami keluhan kesehatan.

➤ **Penggunaan Air Bersih**

Selain dilihat dari tingkat morbiditas, derajat kesehatan masyarakat juga dapat diamati dari pola hidup. Pola hidup mempengaruhi tingkat kesehatan. Pola hidup yang bersih dan sehat tentunya lebih dapat menjamin kesehatan jika dibandingkan dengan pola hidup yang tidak bersih. Penggunaan air bersih baik itu sumber air minum maupun yang lainnya menentukan kondisi kesehatan masyarakat. Sumber air minum menentukan kualitas air minum. Hasil Susenas 2013 menunjukkan bahwa sebesar 43,74 persen rumah tangga di Papua Barat memiliki fasilitas air minum sendiri; 27,65 persen milik bersama; 25,38 persen fasilitas umum; dan 3,23 persen tidak ada fasilitas air minum.

Perkembangan kondisi penggunaan air bersih mengalami perbaikan kualitas, hal ini terlihat dari persentase penggunaan fasilitas air sendiri yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan persentase penggunaan fasilitas air minum milik umum dan tidak memiliki fasilitas, meskipun fasilitas air minum milik sendiri sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya (lihat Gambar 3.9).



Sumber : Susenas 2013

Kabupaten Sorong menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Papua Barat sebagai kabupaten yang rumah tangganya memiliki fasilitas air minum sendiri (81,38%). Sedangkan Kabupaten Maybrat adalah yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya yang rumah tangganya memiliki fasilitas air minum sendiri yaitu sebesar 15,79 persen. Rumah tangga di Kabupaten Teluk Wondama terbanyak memiliki fasilitas air minum bersama (46,57%), sedangkan untuk kab/kota yang rumah tangganya memiliki fasilitas air minum umum terbesar yaitu Kabupaten Maybrat (77,11%).

Kondisi penggunaan fasilitas air minum memiliki karakteristik yang berbeda pada beberapa kabupaten/kota. Sebagian besar diantaranya

telah memiliki kondisi yang lebih baik dengan menggunakan fasilitas air minum milik sendiri maupun yang digunakan secara bersama. Namun di beberapa kabupaten seperti Maybrat, Raja Ampat, Tambrau dan Sorong Selatan persentase penggunaan fasilitas air minum milik umum dan bahkan tidak memiliki fasilitas umum masih relatif tinggi. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan dari masyarakat (lihat Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Kabupaten/kota	Fasilitas Air Minum				Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	66,56	20,88	3,32	9,24	100,00
Kaimana	53,33	27,24	19,14	0,30	100,00
Teluk Wondama	31,02	46,57	21,73	0,68	100,00
Teluk Bintuni	40,75	36,17	23,08	N.A	100,00
Manokwari	28,77	39,20	28,47	3,56	100,00
Sorong Selatan	20,14	38,67	33,94	7,25	100,00
Sorong	81,38	5,59	8,94	4,08	100,00
Raja Ampat	35,72	25,67	37,96	0,65	100,00
Tambrau	24,03	33,02	34,96	7,99	100,00
Maybrat	15,79	6,38	77,11	0,73	100,00
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
Kota Sorong	57,11	29,57	13,31	N.A	100,00
Papua Barat	43,74	27,65	25,38	3,23	100,00

Sumber: Susenas, 2013

➤ Penggunaan Pembuangan Tinja

Selain fasilitas air minum, sanitasi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Hal yang sangat penting adalah penggunaan pembuangan tinja. Pengelolaan pembuangan akhir ini idealnya memiliki tempat khusus (tangki septik) sehingga tidak menimbulkan penyakit. Data pada Tabel 3.9 menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw mempunyai persentase yang sangat rendah pada fasilitas tempat buang air besar sendiri yaitu masing-masing sebesar 29,04 persen dan 16,79 persen. Bahkan pada dua kabupaten tersebut persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar mencapai 19,98 persen dan 17,65 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang sebagian besar rumah tangganya telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri adalah Kota Sorong (74,32%), Kabupaten Sorong (72,72%); Kabupaten Fakfak (68,60%); dan Kabupaten Manokwari (66,33%).

Secara umum, sebanyak 8,20 persen dari seluruh rumah tangga di Papua Barat tidak ada atau tidak memiliki tempat pembuangan tinja. Sedangkan rincian lainnya yaitu sebesar 59,24 persen memiliki fasilitas pembuangan air besar sendiri; 16,49 persen milik bersama; dan 16,08 persen fasilitas milik umum.

Masih relatif tingginya persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan sistem sanitasi di Papua Barat. Hal ini diperkuat dengan semakin menurunnya persentase rumah tangga gabungan antara yang menggunakan fasilitas buang air besar sendiri dan bersama dibandingkan tahun sebelumnya (78,74 persen di tahun 2012 menjadi 75,73 persen di tahun 2013), meskipun rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat

buang air besar persentasenya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 9,97 persen menjadi 8,20 persen.

Tabel 3.9 Persentase Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Kabupaten/kota	Fasilitas Tempat Buang Air Besar				Total
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fakfak	68,60	17,04	5,67	8,69	100,00
Kaimana	45,43	11,86	36,45	6,27	100,00
Teluk Wondama	32,51	48,33	1,89	17,27	100,00
Teluk Bintuni	55,41	25,27	8,88	10,44	100,00
Manokwari	66,33	14,92	12,46	6,29	100,00
Sorong Selatan	29,04	28,51	22,47	19,98	100,00
Sorong	72,72	2,94	18,38	5,96	100,00
Raja Ampat	31,59	12,97	41,78	13,66	100,00
Tambrauw	16,79	28,04	37,52	17,65	100,00
Maybrat	44,02	10,38	33,09	12,50	100,00
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-
Kota Sorong	74,32	15,96	7,06	2,66	100,00
Papua Barat 2013	59,24	16,49	16,08	8,20	100,00
Papua Barat 2012	61,25	17,49	11,29	9,97	100,00
Papua Barat 2011	54,83	18,55	13,24	13,38	100,00

Sumber: Susenas, 2011-2013

3.3 Kondisi Pendidikan

Dalam pembukaan UUD 1945 telah diamanatkan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia sebuah pesan penting terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia. Pesan yang terkandung dalam tujuan bangsa Indonesia itu ialah mencerdaskan kehidupan

bangsa. Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan sebuah perjuangan dan usaha melalui kegiatan pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 juga telah jelas mengaturnya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selain itu lebih khusus dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab IV Bagian 1 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Kedua ayat ini secara jelas memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya.

Banyak cara yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Diantaranya adalah dengan menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun. Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Selanjutnya dalam UU Sisdiknas 2003 pasal 6 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (pasal 17 UU Sisdiknas 2003).

Upaya mempercepat tercapainya gerakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan. Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (PWPPBA). Berbagai lini institusi terkait dilibatkan dalam upaya gerakan pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara.

Target yang ingin dicapai dalam Inpres No. 5 tahun 2006 antara lain adalah:

- a. Meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 7-12 tahun atau Angka Partisipasi Murni sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008.
- b. Meningkatkan persentase peserta didik Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/pendidikan yang sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun atau Angka Partisipasi Kasar (APK) sekurang-kurangnya menjadi 95 persen pada akhir tahun 2008.
- c. Menurunkan persentase penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas atau sekurang-kurangnya menjadi 5 persen pada akhir tahun 2009.

Pemerintah juga telah melakukan sebuah langkah konkret dalam upaya mensukseskan pendidikan di Indonesia dengan mencantumkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti yang dicantumkan dalam amanat konstitusi amandemen UUD 1945 yang kemudian ditegaskan lagi dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 49 ayat (1) bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Suatu

angka fantastik yang sebelumnya tidak pernah lebih dari lima persen. Namun di tahun 2010 persentasenya telah sesuai dengan target, yaitu mencapai 20 persen dan persentasenya kembali meningkat di tahun 2013. Persentase alokasi untuk penyelenggaraan pendidikan kabupaten/kota di Papua Barat sampai dengan tahun 2013 umumnya sudah mencapai 20 persen seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Langkah-langkah tersebut diatas merupakan semata-mata dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa indikator pendidikan terpilih digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan di Papua Barat diuraikan sebagai berikut:

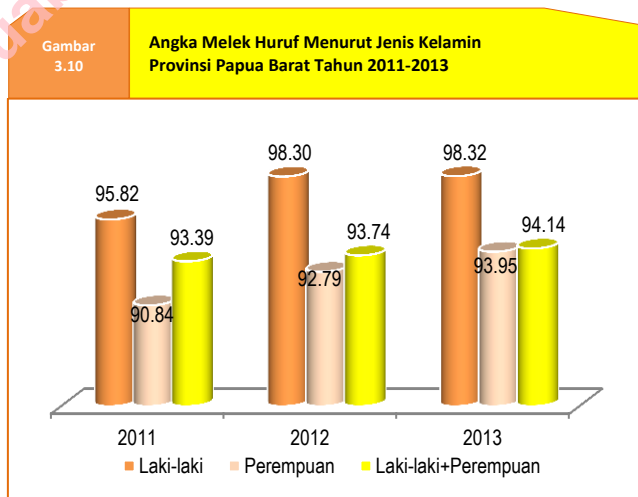
3.3.1 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan adalah angka melek huruf. Angka melek huruf mengindikasikan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis. Bagaimanapun juga kemampuan dasar pertama kali yang dimiliki seseorang untuk dapat menambah dan mengasah ilmu pengetahuan adalah dengan membaca dan menulis. Dalam hal ini, angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Angka melek huruf Papua Barat tahun 2013 adalah sebesar 94,14 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 93,39 persen dan 93,74 persen. Semakin tinggi angka melek

huruf maka kenaikan persentase angka melek huruf ini akan cenderung semakin lambat. Dalam artian pertumbuhan angka melek hurufnya semakin kecil atau mengalami perlambatan. Angka melek huruf menurut jenis kelamin menunjukkan kecenderungan bahwa penduduk laki-laki mempunyai angka melek huruf yang lebih baik dari pada angka melek huruf penduduk perempuan pada tahun 2011-2013. Hal ini menggambarkan belum adanya kesetaraan gender dalam hal kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya di Provinsi Papua Barat.

Angka melek huruf penduduk laki-laki tahun 2012 sebesar 98,30 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 yaitu sebesar 95,82 persen. Angka melek huruf penduduk laki-laki kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 98,32 persen terhadap tahun 2012, atau mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen.



Sumber: Susenas, 2011-2013

Angka melek huruf perempuan selalu lebih rendah dari angka melek huruf penduduk laki-laki namun menunjukkan tren yang sama dengan penduduk laki-laki. Angka melek huruf perempuan tahun 2013 meningkat sebesar 1,16 persen menjadi 93,95 persen dibandingkan tahun 2012.

Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia angka melek huruf digunakan sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di bidang pendidikan bersama dengan indikator rata-rata lama sekolah. Indikator angka melek huruf ini mempunyai bobot dua kali lebih besar dari indikator rata-rata lama sekolah.

Sebaran kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya menurut kabupaten/kota dan angka buta huruf dapat dilihat pada Tabel 3.10. Secara agregat, kemampuan membaca huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya berturut-turut adalah 95,92 persen; 19,08 persen; dan 1,29 persen. Kemampuan penduduk membaca huruf latin tertinggi berada di Kota Sorong yakni sebesar 99,39 persen dan yang terendah berada di Kabupaten Tambrauw sebesar 74,58 persen.

Angka buta huruf diperoleh dari banyaknya penduduk berusia 10 tahun keatas yang tidak mampu membaca huruf latin dan atau huruf lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas atau seratus persen jumlah penduduk dikurangi dengan persentase angka melek huruf maka diperoleh angka buta huruf. Pada angka buta huruf batasan umur yang digunakan juga penduduk yang berumur 10 tahun keatas. Namun angka buta huruf juga dapat dihitung untuk penduduk diatas 15 tahun atau sesuai dengan kebutuhan analisis. Angka buta huruf penduduk usia 10 tahun keatas tertinggi terjadi di Kabupaten Tambrauw yaitu sebesar 25,42 persen. Sementara angka buta huruf terendah berada di Kota

Sorong yaitu sebesar 0,61 persen. Sementara angka buta huruf penduduk usia 10 tahun keatas secara umum di Papua Barat adalah 4,00 persen.

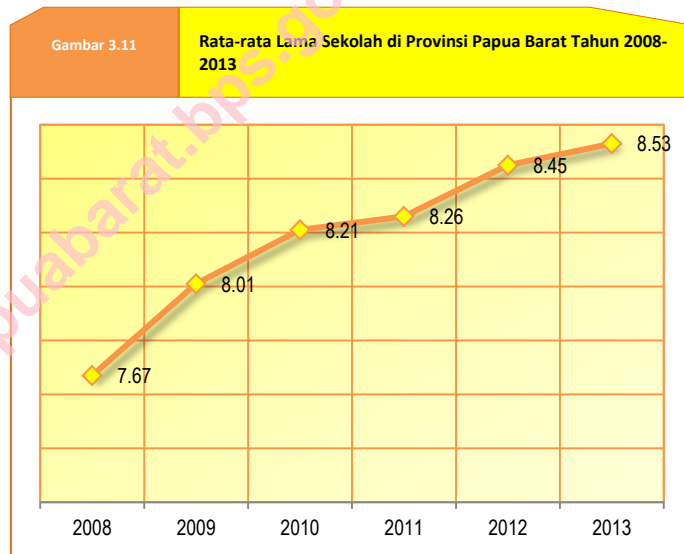
Tabel 3.10 Persentase Kemampuan Penduduk Usia 10 Tahun Keatas membaca Huruf Latin, Huruf Arab, Huruf Linnya dan Angka Buta Huruf Provinsi Papua Barat Tahun 2013

Kabupaten/kota	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	98,96	47,61	0,86	1,04
Kaimana	97,72	19,37	0,60	2,28
Teluk Wondama	90,34	7,92	2,45	7,92
Teluk Bintuni	93,08	12,68	1,15	6,84
Manokwari	93,90	22,05	1,11	6,04
Sorong Selatan	94,99	8,33	0,17	4,96
Sorong	95,93	15,69	4,78	3,93
Raja Ampat	98,95	10,73	0,30	1,05
Tambora	74,58	0,08	0,66	25,42
Maybrat	95,53	N.A	1,29	4,47
Manokwari Selatan	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Kota Sorong	99,39	18,06	0,83	0,61
Papua Barat	95,92	19,08	1,29	4,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2013

3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan lain yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun keatas. Dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia indikator ini merupakan salah satu parameter untuk mengukur indeks pendidikan bersama-sama dengan angka melek huruf.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008-2013

Berdasarkan Gambar 3.11, rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 8,53 tahun atau

mengalami peningkatan dari tahun 2012 dan 2011 yakni sebesar 8,45 tahun dan 8,26 tahun.

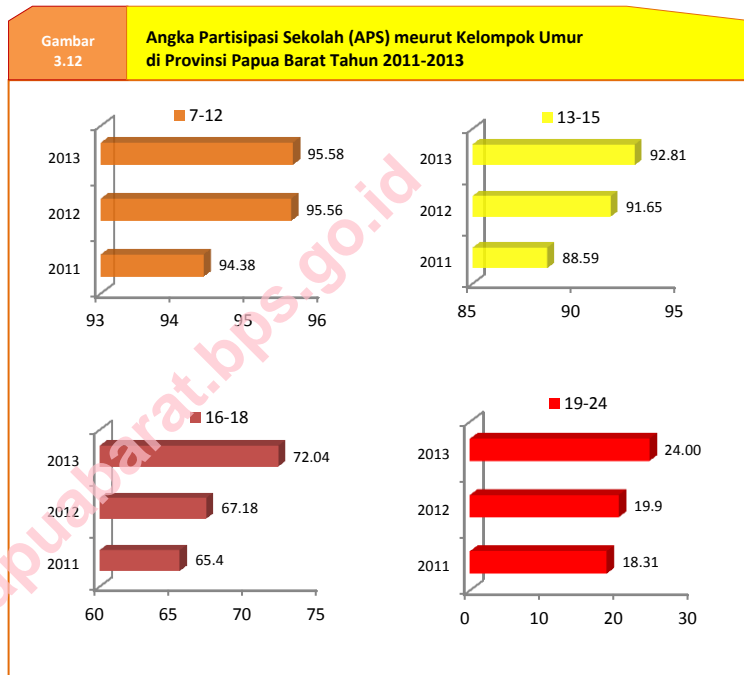
Rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat tahun 2013 sebesar 8,53 artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat baru mampu menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP atau putus sekolah di kelas 3 SLTP.

3.3.3 Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu, atau biasa disebut dengan angka partisipasi sekolah (APS). Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dibidang pembangunan, khususnya berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

APS penduduk usia 7-12 tahun mengalami peningkatan dari 94,38 persen di tahun 2011 menjadi 95,56 persen di tahun 2012. APS pada usia ini kembali meningkat menjadi 95,58 persen di tahun 2013. Kondisi yang sama terjadi pada penduduk usia 13-15 tahun. Pada kondisi ini APS mengalami peningkatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu dari 88,59 persen menjadi 91,65 persen. Di tahun 2013 APS di usia ini kembali mengalami peningkatan menjadi 92,81 persen. Tren yang selaras terjadi pada APS penduduk usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun dengan APS usia 7-12 tahun, kedua kelompok umur ini juga terus mengalami peningkatan angka APS dan mempunyai kesamaan pola pergerakan. APS Penduduk usia 16-18 mengalami peningkatan dari 65,40 persen di tahun 2011 menjadi 67,18 persen di tahun 2012. Kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 72,04 persen. APS penduduk usia 19-

24 tahun mengalami peningkatan dari 18,31 persen di tahun 2011 menjadi 19,90 persen di tahun 2012, di tahun 2013 APS usia 19-24 mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 24,00 persen.



Sumber : BPS, Susenas 2013

Pada tahun 2013, APS penduduk usia 7-12 tahun mencapai 95,58 persen berarti masih ada sekitar 4,42 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak dapat mengenyam pendidikan atau telah putus sekolah. Demikian pula pada penduduk usia 13-15 dan 16-18 persen, terdapat 7,19 persen dan 27,96 persen pada kelompok umur tersebut yang tidak

melanjutkan sekolahnya. Sementara pada penduduk usia 19-24 hanya 24,00 persen saja yang melanjutkan sekolah.

Peningkatan APS penduduk usia 7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24 mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah SD/MI/ sederajat, SLTA/MA/ sederajat, dan perguruan tinggi mengalami peningkatan. Tren peningkatan ini memberikan optimisme bahwa angka APS untuk semua jenjang kelompok umur akan terus mengalami peningkatan di masa mendatang.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu pada interval usia di tingkat pendidikan tersebut.

Secara agregat, di tahun 2013 terjadi peningkatan APK di jenjang pendidikan SD/MI, SLTA/MA, dan perguruan tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, sedangkan pada jenjang pendidikan SLTP/MTs mengalami penurunan APK. Khusus untuk jenjang pendidikan SD/MI memang terjadi kenaikan APK, tetapi hal ini justru merupakan sesuatu hal yang kurang baik karena nilai APK pada jenjang pendidikan SD/MI berada semakin jauh di atas angka 100 persen. Jadi APK SD/MI turun semakin mendekati angka 100 persen, artinya bahwa penduduk yang bersekolah SD/MI semakin mendekati usia sekolah yang tepat pada jenjang pendidikan tersebut (7-12 tahun). Semakin jauh di atas 100 persen maka semakin besar penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut berada diluar *range* usia pada jenjang pendidikan yang sedang dijalani.

Tabel 3.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	100,74	91,73	99,91	29,41
Kaimana	113,66	75,83	82,60	2,36
Teluk Wondama	111,99	65,13	46,92	6,68
Teluk Bintuni	107,11	73,84	49,21	4,30
Manokwari	102,03	90,55	67,34	55,85
Sorong Selatan	103,51	88,01	57,57	11,91
Sorong	108,62	76,89	90,12	16,13
Raja Ampat	103,31	91,02	66,66	2,94
Tambrauw	105,47	79,86	54,30	0,45
Maybrat	106,84	108,95	72,31	2,06
Manokwari Selatan	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Kota Sorong	105,62	94,94	80,41	47,41
Papua Barat 2013	105,27	87,71	73,15	32,34
Papua Barat 2012	105,21	90,95	70,48	25,99
Papua Barat 2011	104,57	87,63	66,74	23,21

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2011-2013

APK SD tahun 2013 sebesar 105,27 persen artinya masih terdapat penduduk diluar usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) yang sedang bersekolah SD/MI karena APK berada diatas 100 persen. Dengan kata lain, jika semua penduduk diusia 7-12 tahun bersekolah maka akan ada sekitar 5 persen siswa yang sedang bersekolah SD/MI berada diluar usia sekolah SD/MI (7-12 tahun)

Menurut data Susenas 2013, APK SD/MI seluruh kabupaten/kota di Papua Barat berada diatas 100 persen. Kabupaten Fak-Fak adalah

contoh APK yang paling mendekati ideal, dimana hanya 0,74 persen penduduk yang bersekolah di SD/MI berada diluar umur yang tepat dengan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. APK SD/MI Kabupaten Kaimana adalah APK tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Papua Barat yakni sebesar 113,66 persen. Artinya jika semua penduduk usia 7-12 tahun bersekolah maka 13,66 persen dari jumlah siswa SD/MI yang sedang bersekolah berada diluar batas usia 7-12 tahun. Jika nilai APK SD/MI kabupaten/kota dibawah 100 persen mengandung makna bahwa jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI lebih kecil dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang semestinya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

APK SLTP/MTs Papua Barat tahun 2012 sebesar 90,95 persen mengalami penurunan menjadi 87,71 persen pada tahun 2013, setelah sebelumnya mengalami peningkatan dari 87,73 persen di tahun 2011. APK SLTP/MTs sebesar 87,71 persen mengandung arti banyaknya penduduk yang sedang bersekolah di SLTP/MTs hanya sebesar 87,71 persen diantara penduduk berumur 13-15 tahun, selebihnya tidak sedang menempuh pendidikan, oleh karena putus sekolah, masuk kedalam usia sekolah lainnya, atau alasan lainnya untuk tidak melanjutkan sekolah.

Distribusi APK SLTP/MTs menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kabupaten Maybrat memiliki APK yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya yakni sebesar 108,95 persen. Kabupaten Teluk Wondama memiliki APK SLTP/MTs terendah yaitu sebesar 65,13, artinya lebih dari sepertiga diantara penduduk usia 13-15 tahun sedang tidak bersekolah di SLTP/MTs karena putus sekolah atau sebab lainnya.

Tabel 3.12 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	86,77	67,19	75,61	20,91
Kaimana	90,53	52,89	51,93	1,31
Teluk Wondama	84,16	40,21	25,42	0,23
Teluk Bintuni	89,43	51,02	41,90	1,33
Manokwari	90,18	61,01	53,98	34,73
Sorong Selatan	87,41	50,80	46,52	6,84
Sorong	94,12	56,62	53,93	13,61
Raja Ampat	88,43	63,11	48,16	1,43
Tambrauw	89,45	60,96	37,85	N.A
Maybrat	90,96	74,98	52,65	N.A
Manokwari Selatan	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Kota Sorong	91,59	69,80	59,17	28,35
Papua Barat 2013	89,94	60,99	54,20	20,10
Papua Barat 2012	88,97	59,76	46,46	15,75
Papua Barat 2011	88,28	57,66	47,88	13,86

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2011-2013

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM dibagi menjadi kelompok APM SD untuk penduduk yang berusia 7-12 tahun, APM SLTP untuk penduduk yang berusia 13-15 tahun dan APM SLTA untuk penduduk yang berusia 16-18 tahun serta APM perguruan tinggi untuk penduduk yang berusia 19-24 tahun.

Angka partisipasi murni Provinsi Papua Barat tahun 2013 mengalami peningkatan di semua level pendidikan dibandingkan tahun 2012. APM SD/MI meningkat menjadi 89,94 persen pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 88,97 persen. APM SD/MI sebesar 89,94 persen mempunyai makna sekitar 89-90 orang diantara 100 penduduk usia 7-12 tahun sedang bersekolah SD/MI dan tepat berumur 7-12 tahun.

APM SLTP/MTs meningkat menjadi 60,99 persen di tahun 2013 setelah pada tahun sebelumnya sebesar 59,76 persen. APM SLTP/MTs jauh lebih kecil dibandingkan dengan APM SD/MI hal ini memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang ikut berpartisipasi sekolah SLTP/MTs dibandingkan dengan penduduk yang berpartisipasi sekolah SD/MI pada usia 7-12 tahun menurun tajam atau dengan kata lain banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTP/MTs pada penduduk berusia 13-15 tahun maupun putus sekolah disaat SLTP/MTs.

APM SLTA/MA tahun 2013 hanya mencapai 54,20 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 yang semula sebesar 46,46 persen. Pada jenjang pendidikan ini, APM-nya juga lebih rendah dari APM SLTP/MTs. Artinya tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah SLTA/MA tepat pada umur 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah SLTP/MTs tepat pada usia 13-15 tahun. Dapat diartikan pula proporsi penduduk yang berusia 16-18 tahun untuk melanjutkan sekolah di SLTA/MA lebih kecil dibandingkan dengan proporsi penduduk usia 13-15 tahun untuk melanjutkan pendidikan SLTP/MTs.

Kecenderungan yang terlihat dari APM untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi adalah bahwa semakin tinggi jenjang

pendidikan yang ditempuh seseorang maka tingkat partisipasinya semakin rendah. Dengan demikian dapat diartikan pula semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka angka putus sekolahnya semakin besar.

Berdasarkan sebarannya menurut kabupaten/kota, APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI berada di Kabupaten Sorong yaitu sebesar 94,12 persen; APM SLTP/MTs berada di Kabupaten Maybrat sebesar 74,98 persen; APM SLTA/MA di Kabupaten Fak-Fak sebesar 75,61 persen; dan APM Perguruan Tinggi berada di Kabupaten Manokwari sebesar 34,73 persen.

Tren perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan memang mengalami peningkatan, namun angka APM untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs keatas masih relatif rendah. Apalagi *gap* antara APM SD/MI dengan SLTP/MTs dan APM SLTA/MA dengan APM perguruan tinggi terlalu jauh. Hal ini menginformasikan bahwa siswa putus sekolah terbesar terjadi ketika siswa menyelesaikan pendidikan SD/MI dan SLTA/MA ke jenjang pendidikan selanjutnya.

3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun keatas. Level pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan antar waktu dan antar wilayah.

Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (diatas SLTA). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa penduduk yang memiliki ijazah perguruan tinggi persentasenya lebih rendah.

Tabel 3.13 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Papua Barat 2011-2013

Kabupaten/kota	Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki					Total
	Tidak punyai ijazah	SD/se- derajat	SMP/ se- derajat	SLTA/ se- derajat	Perguru- an Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
Fakfak	21,83	21,65	20,97	24,02	11,53	100,00
Kaimana	31,51	28,54	14,01	17,90	8,05	100,00
Teluk Wondama	33,88	30,72	15,40	15,38	4,62	100,00
Teluk Bintuni	28,99	28,78	17,93	19,00	5,29	100,00
Manokwari	24,22	17,54	17,52	28,93	11,78	100,00
Sorong Selatan	29,71	35,54	16,94	11,02	6,80	100,00
Sorong	27,47	27,37	22,23	19,37	3,56	100,00
Raja Ampat	23,88	38,60	17,05	14,02	6,45	100,00
Tambrauw	59,68	20,26	9,83	8,54	1,69	100,00
Maybrat	38,91	25,27	13,77	11,64	10,41	100,00
Manokwari Selatan	-	-	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-	-	-
Kota Sorong	12,37	17,32	21,23	37,52	11,55	100,00
Papua Barat 2013	24,70	23,46	18,33	24,26	9,25	100,00
Papua Barat 2012	19,47	23,82	19,46	27,03	10,22	100,00
Papua Barat 2011	25,81	22,99	17,14	25,30	8,76	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2011-2013

Dalam Tabel 3.13 secara umum di Papua Barat masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini tampak pada besarnya persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah. Pada tahun 2013 persentase

penduduk yang berpendidikan SD kebawah hampir dari separuh penduduk berusia 10 tahun di Papua Barat atau sebesar 48,16 persen.

Persentase penduduk yang berpendidikan dibawah SD mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu menjadi 23,46 persen. Sementara penduduk yang berpendidikan SLTA keatas pada tahun 2013 adalah sebesar 33,51 persen dengan rincian 24,26 persen berpendidikan SLTA/ sederajat dan 9,25 persen berpendidikan perguruan tinggi. Kondisi penduduk yang berpendidikan SLTA keatas pada tahun 2013 menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 penduduk yang berpendidikan SLTA keatas 37,25 persen (27,03 persen berpendidikan SLTA dan 10,22 persen berpendidikan perguruan tinggi) atau mengalami penurunan sebesar 3,74 persen. Kondisi ini menandakan terdapat penurunan kualitas pendidikan dengan meningkatnya persentase pendidikan rendah dan menurunnya persentase pendidikan tinggi.

Kualitas pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan menurut sebaran kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Sorong memiliki kualitas sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tertinggi yang paling baik. Kota Sorong mempunyai persentase penduduk dengan pendidikan SLTA keatas terbesar diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 49,08 persen. Disamping itu, Kota Sorong juga memiliki persentase penduduk yang berpendidikan SD kebawah yang paling kecil yaitu hanya 29,69 persen. Disisi lain, Kabupaten Tambrauw menjadi kabupaten dengan kualitas pendidikan sumber daya manusia paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya. Persentase penduduk yang berpendidikan rendah di Kabupaten Tambrauw mencapai 79,95 persen dengan rincian 59,68 persen tidak punya ijazah (tidak pernah sekolah/tidak tamat SD) dan 20,26 persen hanya tamatan SD. Sedangkan

persentase penduduk yang berpendidikan tinggi (SLTA keatas) terendah juga terdapat di Kabupaten Kabupaten Tambrauw yaitu hanya 10,23 persen.

3.4 Kondisi Perekonomian

Situasi perekonomian secara makro Provinsi Papua Barat diukur dengan besarnya Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari kumulatif seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun atau biasa dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan kinerja perekonomian diukur dari kenaikan PDRB terhadap tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan 2000. Sementara struktur perekonomian ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor.

PDRB Provinsi Papua Barat dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan 2000 (ADHK). Penghitungan juga dibedakan dengan menyertakan minyak dan gas (dengan migas) dan tanpa minyak dan gas (tanpa migas).

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Provinsi Papua Barat tahun 2013 sebesar Rp. 50,91 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 15,06 triliun atas dasar harga konstan. PDRB tahun 2013 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu semula Rp. 43,02 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 13,78 triliun atas dasar harga konstan 2000.

Bila tanpa memperhitungkan subsektor migas, besarnya PDRB Papua Barat tahun 2013 mencapai Rp. 22,54 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 7,54 triliun atas dasar harga konstan 2000. PDRB tanpa

migas juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 dari sebesar Rp. 19,17 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 6,99 atau 7,00 triliun atas dasar harga konstan.

Perbedaan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas sebesar Rp. 28,37 triliun atau lebih dari setengah total PDRB Papua Barat (55,72%). Hal ini membuktikan bahwa kontribusi subsektor migas dalam PDRB sangat signifikan.

PDRB menurut kabupaten/kota dengan migas tercatat atas dasar harga berlaku tahun 2013 tertinggi berada di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp. 24,06 triliun. Demikian pula atas dasar harga konstan dengan migas PDRB tertinggi berada di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp. 6,79 triliun.

Sementara bila unsur migas tidak diperhitungkan dalam penghitungan PDRB, maka di tahun 2013, Kota Sorong memiliki nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 tertinggi diantara kabupaten lainnya. Besarnya PDRB Kota Sorong masing-masing Rp. 5,28 triliun dan Rp. 1,98 triliun. PDRB tahun 2013 terendah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 ditempati oleh Kabupaten Tambrauw dengan besaran PDRB Rp. 110,92 miliar dan Rp. 37,79 miliar.

**Tabel 3.14 PDRB Menurut Kabupaten/Kota ADHB dan ADHK
Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013
(Juta Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	2 128 630,81	823 107,20	2 128 630,81	823 107,20
Kaimana	1 331 826,96	500 948,94	1 331 826,96	500 948,94
Teluk Wondama	566 813,91	222 836,33	566 813,91	222 836,33
Teluk Bintuni	24 061 709,40	6 795 811,69	1 421 257,18	679 614,95
Manokwari	4 435 887,81	1 313 594,20	4 435 887,81	1 313 594,20
Sorong Selatan	650 894,03	223 149,61	650 894,03	223 149,61
Sorong	7 439 182,42	2 003 814,81	2 250 414,62	852 902,66
Raja Ampat	1 381 150,74	575 881,78	822 643,30	324 639,53
Tambrau	110 918,95	37 790,09	110 918,95	37 790,09
Maybrat	275 928,59	99 147,58	275 928,59	99 147,58
Manokwari Selatan	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Kota Sorong	5 281 198,31	1 979 554,67	5 281 198,31	1 979 554,67
PDRB Papua Barat 2013 **	50 908 726,59	15 061 518,72	22 544 624,25	7 543 167,58
PDRB Papua Barat 2012 *	43 204 816,69	13 780 123,19	19 167 637,57	6 995 731,36
PDRB Papua Barat 2011	36 176 187,33	11 890 142,26	16 573 028,59	6 508 189,53

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2013

Catatan : * angka sementara ** angka sangat sementara

3.4.2 Struktur Ekonomi Regional

Struktur perekonomian Papua Barat ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku menurut sektor atau lapangan usaha. Struktur ini memperlihatkan sektor-sektor utama yang berkontribusi besar dalam perekonomian.

Pada tahun 2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Papua Barat sebesar 54,28 persen. Kemudian

sektor pertanian memberikan kontribusi 11,65 persen, sementara sektor lainnya memberikan sumbangan terhadap PDRB masing-masing kurang dari 10 persen.

Berdasarkan Tabel 3.20 terdapat tiga sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB dari tahun 2011-2012. Ketiga sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan bangunan. Sektor pertanian selalu memberikan kontribusi terbesar PDRB dari tahun 2000-2008 dan berangsur-angsur mengalami penurunan, namun di tahun 2009 dan 2013 sektor industri pengolahan menjadi kontributor utama dalam distribusi PDRB Papua Barat. Di tahun 2011, 2012, dan 2013 industri pengolahan memberikan *share* 51,66 persen, 53,48 persen, dan 54,28 persen.

Tabel 3.15 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Lapangan Usaha	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	13,77	12,36	11,65
Pertambangan dan Penggalian	7,23	6,50	5,69
Industri Pengolahan	51,66	53,48	54,28
Listrik, Gas & Air Bersih	0,31	0,29	0,30
Bangunan	6,86	7,26	7,73
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6,47	6,55	6,90
Pengangkutan dan Komunikasi	4,70	4,73	4,75
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,85	1,85	1,98
Jasa-jasa	7,14	6,97	6,72
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2013

Catatan : * angka sementara ** angka sangat sementara

Sama halnya dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian sempat menjadi tiga besar kontributor selama tahun 2000-2010, serta memiliki pola kontribusi yang sama dengan sektor pertanian. Sektor pertambangan dan penggalian juga terus mengalami penurunan persentase sumbangan terhadap PDRB Papua Barat.

Sektor industri pengolahan selalu konsisten memberikan kontribusi terbesar kedua selama tahun 2004-2008, bahkan persentase sumbangan terhadap PDRB terus mengalami peningkatan. Kontribusi sektor industri pengolahan menjadi yang utama sejak tahun 2009 menggeser sektor pertanian. Kontribusi sektor ini di tahun 2009 sebesar 28,06 persen, kemudian tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 44,54 persen. Pada tahun 2013 kontribusi sektor ini kembali mengalami peningkatan menjadi 54,28 persen. Besarnya peran sektor industri pengolahan sejak 2009 dipicu oleh mulai berproduksinya LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni.

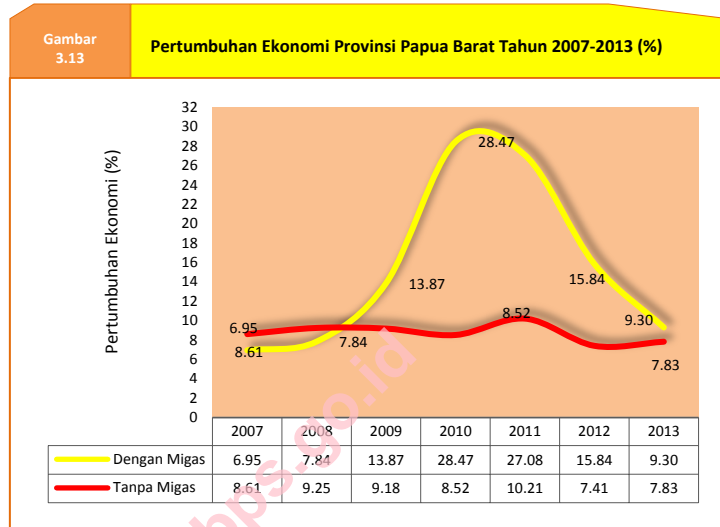
Penurunan secara berangsur-angsur kontribusi sektor pertanian dan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; dan jasa-jasa di dalam memberikan nilai tambah pada PDRB menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier.

3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi disuatu daerah biasanya dengan membandingkan besarnya nilai tambah antar waktu menurut harga konstan. Dengan menggunakan dasar harga konstan dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan riil dari suatu daerah yang menggambarkan kondisi perekonomian yang dapat diperbandingkan antar waktu dan wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2013 dengan migas sebesar 9,30 persen. Kondisi ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2012 lalu dimana di tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Papua Barat juga menurun cukup tajam dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 27,08 persen. Hal ini dipicu oleh menurunnya kinerja industri pengolahan khususnya pengolahan migas di LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni yang mulai mengalami penurunan sejak tahun 2011. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun PDRB dengan migas dari tahun 2007-2013 sebesar 5,06 persen.

Dengan tanpa memperhitungkan subsektor migas (tanpa migas), pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2013 sebesar 7,83 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 7,41 persen maupun walaupun mengalami penurunan dibanding tahun 2011 yang mencapai 10,21 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun 2007-2013 tanpa migas di Papua Barat mencapai 3,38 persen. Jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sangat signifikan tersebut dipengaruhi oleh subsektor migas.



Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2013
 Catatan : * angka sementara (2012) ** angka sangat sementara (2013)

3.4.4 PDRE per Kapita

Sebuah nilai yang cukup relevan dalam menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara makro ekonomi adalah dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita. Pada PDRB per kapita, besaran nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dari wilayah tersebut. Jadi besarnya PDRB telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah, sehingga tingginya PDRB tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar.

PDRB per kapita Papua Barat dengan migas tahun 2013 mencapai Rp. 61,46 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 18,18 juta atas dasar harga konstan 2000. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan keadaan

tahun 2012 sebesar Rp 53,53 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 17,07 juta atas dasar harga konstan 2000. Sedangkan PDRB per kapita Papua Barat tanpa migas tahun 2013 mencapai Rp. 27,22 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 9,11 juta atas dasar harga konstan 2000. Kondisi tersebut juga lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp. 23,75 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 8,67 juta atas dasar harga konstan 2000.

PDRB per kapita dengan migas tertinggi menurut kabupaten/kota berdasarkan Tabel 3.22 adalah Kabupaten Teluk Bintuni yakni sebesar Rp. 425,14 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 120,07 juta atas dasar harga konstan 2000. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku per kapita tanpa migas tertinggi berada di Kabupaten Fak Fak yakni mencapai Rp. 30,02 juta dan untuk PDRB atas dasar harga konstan 2000 per kapita tanpa migas tertinggi yaitu Kabupaten Teluk Bituni (Rp. 12,01 juta).

Sedangkan PDRB per kapita dengan migas terendah berada di Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 7,71 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 2,77 juta atas dasar harga konstan 2000. Bila tanpa memperhitungkan subsektor minyak dan gas (tanpa migas) PDRB per kapita terendah masih tetap ditempati Kabupaten Maybrat sebesar Rp. 7,71 juta atas dasar harga berlaku dan Rp. 2,77 juta atas dasar harga konstan 2000.

PDRB per kapita Kabupaten Teluk Bintuni merupakan yang tertinggi di Papua Barat, yaitu sebesar Rp. 425,14 juta per tahun. Artinya rata-rata PDRB per kapita adalah sebesar Rp. 35,43 juta per bulan. Sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Maybrat yang merupakan PDRB per kapita terendah (Rp. 7,71 juta) memiliki rata-rata Rp. 0,64 juta per bulan.

Kesenjangan yang sangat nyata tampak dari kondisi ini, dimana *gap* antara daerah dengan PDRB per kapita tertinggi dan terendah sangat jauh, yakni mencapai Rp. 417,43 juta per tahun.

**Tabel 3.16 PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013
(Juta Rupiah)**

Kabupaten/Kota	Dengan Migas		Tanpa Migas	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fakfak	30,02	11,61	30,02	11,61
Kaimana	26,06	9,80	26,06	9,80
Teluk Wondama	19,86	7,81	19,86	7,81
Teluk Bintuni	425,14	120,07	25,11	12,01
Manokwari	29,54	8,75	29,54	8,75
Sorong Selatan	15,84	5,43	15,84	5,43
Sorong	97,03	26,14	29,35	11,12
Raja Ampat	30,99	12,92	18,46	7,28
Tambrauw	8,29	2,83	8,29	2,83
Maybrat	7,71	2,77	7,71	2,77
Manokwari Selatan	-	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-	-
Kota Sorong	24,93	9,34	24,93	9,34
Papua Barat 2013**	61,46	18,18	27,22	9,11
Papua Barat 2012*	53,53	17,07	23,75	8,67
Papua Barat 2011	46,02	15,13	21,08	8,28

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Prov Papua Barat 2013

Catatan : * angka sementara ** angka sangat sementara

BAB IV

PERKEMBANGAN KOMPONEN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2011-2013

IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Sedangkan komponen-komponen tersebut bervariasi untuk tiap kabupaten/kota. Kemajuan ini sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Perkembangan komponen-komponen penyusun IPM selanjutnya akan dibahas untuk melihat komponen-komponen mana yang berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan capaian IPM kabupaten/kota maupun Provinsi Papua Barat.

Mulai tahun 2009, penghitungan IPM 2009 telah menyertakan dua kabupaten pemekaran baru, yakni Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat. Kabupaten Tambrauw adalah hasil pemekaran dari Kabupaten

Sorong, sedangkan Kabupaten Maybrat adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan. Pada tahun 2013, kembali terdapat kabupaten pemekaran baru yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Dengan demikian di tahun 2013 ini hasil pembangunan manusia yang terukur melalui IPM di Provinsi Papua Barat terbagi menjadi dua belas kabupaten dan satu wilayah kota.

Dalam pemekaran wilayah terdapat kemungkinan kabupaten pemekarannya lebih maju dibandingkan dengan kabupaten induknya atau sebaliknya. Dimungkinkan pula tingkat disparitasnya, sangat memungkinkan antara kabupaten yang dimekarkan jauh tertinggal dari kabupaten induknya.

4.1. Perkembangan Kesehatan

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Berdasarkan Tabel 4.1, secara umum angka harapan hidup di masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Di tahun 2013, angka harapan hidup Provinsi Papua Barat mencapai 69,14 tahun artinya rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat dapat menjalani hidup selama 69 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Sorong sebesar 72,80 tahun dan angka harapan hidup terendah di Kabupaten Tambrau sebesar 66,48 tahun.

Kemajuan angka harapan hidup dapat digambarkan dengan membandingkannya antar tahun. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2021-2013 Papua Barat tercatat tidak mengalami peningkatan maupun penurunan selama satu tahun. Peningkatan angka harapan hidup tertinggi terjadi di Kota Sorong sebesar 0,28 tahun dalam waktu satu tahun. Kabupaten Tambrauw tidak mengalami perubahan dalam waktu satu tahun. Perkembangan angka harapan hidup di Papua Barat di tahun 2011-2013 mengalami peningkatan sebesar 0,33 tahun selama dua tahun. Peningkatan tertinggi AHH untuk dua tahun terakhir terjadi di Kabupaten Raja Ampat sebesar 0,57 tahun, sedangkan Kabupaten Tambrauw memiliki kemajuan peningkatan AHH terkecil yaitu sebesar 0,17 tahun.

Tabel 4.1 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	70,88	71,24	71,33
Kaimana	69,88	70,11	70,11
Teluk Wondama	67,76	68,01	68,06
Teluk Bintuni	68,54	68,88	68,90
Manokwari	68,29	68,58	68,73
Sorong Selatan	66,82	66,99	67,07
Sorong	68,22	68,59	68,65
Raja Ampat	66,50	66,82	67,07
Tambrauw	66,31	66,48	66,48
Maybrat	66,62	66,92	66,95
Manokwari Selatan	-	-	66,64
Pegunungan Arfak	-	-	66,93
Kota Sorong	72,36	72,52	72,80
Papua Barat	68,81	69,14	69,14

Sumber: Diolah dari Susenas 2011-2013

Perkembangan angka harapan hidup per tahun di Papua Barat tercatat tidak melebihi dari satu tahun dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Papua Barat termasuk dalam kategori *Hardrock*, artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga implikasinya adalah angka harapan hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi tersebut juga terjadi untuk kondisi nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

4.2. Perkembangan Pendidikan

Perkembangan komponen pendidikan direpresentasikan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. Bobot kedua indikator ini dalam membentuk komponen pendidikan yaitu dua per tiga bagian adalah angka melek huruf dan sepertiga bagian adalah rata-rata lama sekolah.

4.2.1. Perkembangan Angka Melek Huruf

Angka melek huruf Provinsi Papua Barat tahun 2013 mencapai 94,14 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 dan 2012 masing-masing sebesar 93,74 persen dan 93,39

persen. Selama tahun 2010-2013 angka melek huruf Papua Barat mengalami peningkatan 0,40 persen, sedangkan selama periode 2011-2013 meningkat sebesar 0,75 persen.

Berdasarkan Tabel 4.2, diperoleh informasi bahwa selama kurun waktu tiga tahun Kota Sorong memiliki angka melek huruf tertinggi diantara kabupaten lainnya, yaitu sebesar 99,14 persen; 99,69 persen; dan 99,71 persen. Angka melek huruf Kota Sorong mengalami stagnasi karena AMH Kota Sorong sudah tergolong dalam AMH tinggi sehingga sangat sulit untuk mengalami peningkatan. Hal ini seringkali disebabkan angka buta huruf terjadi pada penduduk usia lanjut yang sudah enggan untuk belajar membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya.

Tabel 4.2 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	98,13	98,47	99,12
Kaimana	96,91	96,99	97,49
Teluk Wondama	84,18	85,12	85,79
Teluk Bintuni	87,05	87,38	87,41
Manokwari	88,77	89,03	89,98
Sorong Selatan	88,43	88,45	88,56
Sorong	91,76	91,84	92,09
Raja Ampat	94,13	94,34	94,86
Tambrauw	77,33	77,38	77,72
Maybrat	90,87	91,22	91,41
Manokwari Selatan	-	-	77,45
Pegunungan Arfak	-	-	74,89
Kota Sorong	99,14	99,69	99,71
Papua Barat	93,39	93,74	94,14

Sumber: Diolah dari Susenas 2011-2013

Sementara angka melek huruf terendah selama kurun waktu dua tahun berada di Kabupaten Tambrauw, yakni masing-masing sebesar 77,33 persen (2011) dan 77,38 persen (2012), sedangkan angka melek huruf terendah di tahun 2013 ada pada Kabupaten Pegunungan Arfak (74,89). Selain rendah, angka melek huruf Kabupaten Pegunungan Arfak juga tertinggal jauh dengan kabupaten/kota lainnya. Jarak terdekat AMH adalah dengan Kabupaten Manokwari Selatan, itupun dengan selisih 2,56 persen. Diperlukan usaha keras untuk mengejar ketertinggalan ini, karena dengan *gap* 2,56 persen mungkin butuh waktu beberapa tahun untuk mencapainya. Rendahnya angka melek huruf di kabupaten ini diduga oleh minimnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan, serta sulitnya akses transportasi ke pemukiman penduduk yang sebagian besar masih tinggal di daerah terpencil.

4.2.2. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Barat rendah maka kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua bergerak sangat lambat. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah Provinsi Papua Barat mencapai 8,53 tahun atau hanya mengalami peningkatan sebesar 0,08 tahun dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan tahun 2012. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2011, angka rata-rata lama sekolah hanya meningkat sebesar 0,27 tahun dalam kurun waktu dua tahun.

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,53 tahun mengandung arti rata-rata penduduk Provinsi Papua Barat hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 2 SLTP atau putus sekolah pada kelas 3 SLTP. Kondisi ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu tiga tahun yaitu periode tahun 2011-2013.

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	9,37	9,49	9,65
Kaimana	7,63	7,95	8,39
Teluk Wondama	6,69	7,14	7,62
Teluk Bintuni	6,91	7,02	7,22
Manokwari	8,43	8,53	8,62
Sorong Selatan	8,06	8,09	8,10
Sorong	8,09	8,11	8,19
Raja Ampat	7,43	7,53	7,64
Tambrau	5,78	5,80	5,83
Maybrat	8,00	8,64	8,64
Manokwari Selatan	-	-	7,10
Pegunungan Arfak	-	-	8,09
Kota Sorong	10,68	10,99	11,02
Papua Barat	8,26	8,45	8,53

Sumber: Diolah dari Susenas 2011-2013

Berdasarkan Tabel 4.3, di tahun 2013, Kota Sorong mempunyai rata-rata lama sekolah tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Rata-rata lama sekolah di Kota Sorong mencapai 11,02 tahun, atau rata-rata penduduk Kota Sorong mampu mengenyam pendidikan sampai

dengan kelas 2 SLTA. Sementara rata-rata lama sekolah terendah terjadi di Kabupaten Tambrauw sebesar 5,83 tahun. Di kabupaten ini rata-rata penduduk hanya mampu bersekolah sampai dengan kelas 5 SD atau putus sekolah setelah kelas 6 SD.

4.3. Perkembangan Paritas Daya Beli

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Untuk itu dalam penghitungan daya beli ini telah menggunakan harga yang telah distandarkan dengan kondisi Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat diperbandingkan.

Hasil penghitungan paritas daya beli ini juga telah di-deflate dengan IHK tahun 1989, jadi nilai paritas daya beli sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan paritas daya beli seperti yang ditampilkan. Penggunaan IHK 1989 ditujukan untuk menjaga konsistensi dan kesamaan metodologi dengan tahun-tahun sebelumnya mulai dari pertama kali IPM dihitung oleh BPS, sehingga dapat diperbandingkan antar waktu meskipun tahun dasar penghitungan inflasi terbaru menggunakan tahun dasar tahun 2007. Tujuan dari pendeblasian harga adalah supaya daya beli ini tidak

terpengaruh oleh perubahan harga, sehingga harus dihitung berdasarkan harga konstan pada tahun dasar tertentu.

Paritas daya beli Provinsi Papua Barat tahun 2013 adalah sebesar Rp. 604.820,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2012 yang mencatat paritas daya beli sebesar Rp. 601.560,-. Kondisi tersebut juga meningkat dibandingkan dengan situasi pada tahun 2011 yang mempunyai paritas daya beli masyarakat sebesar Rp. 599.280,-. Kenaikan paritas daya beli ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik.

Tabel 4.4 Paritas Daya Beli Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013 (Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	592,30	594,23	599,05
Kaimana	601,27	603,01	605,73
Teluk Wondama	601,97	602,76	605,45
Teluk Bintuni	600,33	601,28	604,05
Manokwari	589,12	590,54	592,86
Sorong Selatan	590,23	591,79	596,59
Sorong	600,62	601,41	606,19
Raja Ampat	562,22	563,96	567,35
Tambrauw	443,07	446,25	449,68
Maybrat	583,20	584,54	588,25
Manokwari Selatan	-	-	571,62
Pegunungan Arfak	-	-	565,41
Kota Sorong	638,70	641,28	646,11
Papua Barat	599,28	601,56	604,82

Sumber: Diolah dari Susenas 2011-2013

Menurut Tabel 4.4, Kota Sorong mempunyai paritas daya beli tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu Rp. 638,70 ribu (2011); Rp. 641,28 ribu (2012), dan Rp. 646,11 ribu (2013);. Sementara Kabupaten Tambrauw memiliki paritas daya beli terendah pada tiga tahun terakhir (2011-2013), yaitu Rp 443,07 ribu (2011); Rp. 446,25 ribu (2012), dan Rp. 449,68 ribu (2013).

Kenaikan paritas daya beli Papua Barat ternyata juga diikuti oleh kenaikan indeks daya beli. Indeks daya beli pada tahun 2013 Papua Barat sebesar 56,58, atau kondisi ini lebih baik bila dibandingkan dengan indeks daya beli tahun 2012 dan 2011 yang masing-masing mempunyai nilai indeks sebesar 55,82 dan 55,30 (lihat lampiran 7).

4.4. Perkembangan IPM

Secara umum besarnya capaian IPM Provinsi Papua Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak satupun yang mengalami penurunan angka IPM. Perkembangan capaian nilai IPM menandakan usaha-usaha pembangunan manusia telah berjalan, meskipun ada yang mengalami kemajuan yang pesat dan ada juga yang lambat berkembang.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2013 dua kabupaten pemekaran baru telah dapat dihitung besaran IPM-nya, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebenarnya kedua kabupaten ini telah resmi menjadi daerah otonom sebelum tahun 2013, namun *sufficiency sample* baru dapat tercapai tahun 2013 dan penghitungan pun dapat dilakukan.

Tabel 4.5 IPM dan Perubahan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	IPM			Perubahan (poin)		
	2011	2012	2013	2011-2012	2012-2013	2011-2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fak-Fak	72,13	72,64	73,33	0,51	0,69	1,20
Kaimana	70,71	71,22	71,87	0,51	0,65	1,16
Teluk Wondama	66,06	66,80	67,54	0,74	0,74	1,48
Teluk Bintuni	67,17	67,58	67,95	0,41	0,37	0,78
Manokwari	67,67	68,07	68,61	0,40	0,54	0,94
Sorong Selatan	66,59	66,83	67,28	0,24	0,44	0,69
Sorong	68,93	69,23	69,74	0,30	0,51	0,81
Raja Ampat	65,06	65,49	66,08	0,43	0,60	1,02
Tambrauw	50,81	51,18	51,54	0,37	0,36	0,73
Maybrat	66,43	67,26	67,60	0,83	0,34	1,17
Manokwari Selatan	-	-	61,91	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	61,75	-	-	-!
Kota Sorong	77,72	78,36	78,92	0,64	0,55	1,20
Papua Barat	69,65	70,22	70,62	0,57	0,40	0,97

Sumber: Diolah dari Susenas 2011-2013

IPM Papua Barat pada tahun 2011 sebesar 69,65, kondisi ini mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 70,22 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,57 poin selama setahun. Di tahun 2013 IPM Papua Barat kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,40 poin dibandingkan dengan tahun 2012 menjadi 70,62. Jadi peningkatan capaian IPM 2013-2012 lebih rendah dari pada capaian IPM 2012-2011. Peningkatan capaian IPM Papua Barat masih dapat dipacu lebih cepat lagi dengan program-program pembangunan yang tepat sasaran, mengingat posisi IPM Papua masih berada pada kategori menengah, sehingga lebih mudah untuk ditingkatkan dibandingkan nilai IPM yang sudah tergolong dalam kategori tinggi.

Dari hasil capaian IPM, Kota Sorong menduduki peringkat terbaik di Papua Barat tahun 2011-2013. Capaian nilai IPM jauh lebih baik

dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Papua Barat. Capaian IPM Kota Sorong berturut-turut 77,72 (2011); 78,36 (2012); dan 78,92 (2013). Sementara Kabupaten Tambrauw selama tiga tahun terakhir (2011-2013) selalu menjadi peringkat terakhir dalam rangking capaian IPM Provinsi Papua Barat yaitu 50,81 (2011); 51,18 (2012); dan 51,54 (2013). Capaian tersebut menurut UNDP termasuk dalam kategori rendah yaitu di kisaran dibawah atau sekitar 50,00.

Hasil capaian IPM setiap kabupaten/kota setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan capaian IPM bervariasi setiap daerah. Beberapa daerah memiliki pertumbuhan yang pesat, sementara beberapa daerah lainnya pertumbuhan capaian IPM-nya masih relatif lambat.

Di tahun 2012-2013, tidak satupun kabupaten/kota yang memperoleh capaian IPM diatas satu digit dalam waktu satu tahun. Peningkatan tertinggi hanya sebesar 0,74 poin dalam waktu satu tahun yang dicapai oleh Kabupaten Teluk Wondama. Meskipun selalu tumbuh positif namun empat dari tiga belas kabupaten/kota mengalami perlambatan pertumbuhan terhadap periode sebelumnya. Termasuk yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah capaian IPM Papua Barat. Kabupaten Maybrat adalah kabupaten yang mengalami perlambatan paling tajam dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu mencapai 0,49 poin. Kabupaten ini mengalami perlambatan pertumbuhan dari 0,83 poin di periode 2011-2012 menjadi 0,34 poin di periode 2012-2013. Pada tahun 2011-2012, diantara kabupaten/kota tersebut yang memiliki pertumbuhan yang relatif cepat adalah Kabupaten Maybrat (0,83 poin) dan Kabupaten Teluk Wondama (0,74 poin).

Selama kurun waktu tiga tahun yaitu periode 2011-2013, Kabupaten Teluk Wondama memiliki pertumbuhan capaian IPM yang tertinggi yaitu mencapai 1,48 poin. Capaian tertinggi selanjutnya adalah Kabupaten Fak Fak dan Kota Sorong dengan nilai capaian yang sama yaitu 1,20 poin.

Kecenderungan pencapaian komponen-komponen penyusun IPM menunjukkan bahwa komponen yang capaiannya masih cukup rendah mempunyai peluang untuk lebih cepat berkembang atau meningkat dalam capaian yang tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang telah memiliki komponen yang sudah tinggi atau mendekati nilai maksimum.

Pada penjelasan di atas terlihat bahwa besaran IPM Papua Barat merupakan representasi dari besaran IPM keseluruhan kabupaten/kota. Oleh karena itu, besar atau kecilnya besaran IPM kabupaten/kota sangat mempengaruhi besaran IPM provinsi.

Jika selama periode tahun 2011-2013 besaran IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan besaran IPM provinsi, maka terdapat dua kabupaten/kota yang besarnya relatif lebih tinggi terhadap IPM Provinsi Papua Barat. Kedua kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong.

4.5. Reduksi *Shortfall*

Reduksi *shortfall* ditujukan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian sasaran pembangunan manusia di suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, melalui reduksi *shortfall* ini dapat dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah.

Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai maksimumnya (100 persen), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka capaian

IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah.

Pada tahun 2010-2011 reduksi *shortfall* Papua Barat mencapai 1,62 persen. Pada tahun 2011-2012 reduksi *shortfall* Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan menjadi 1,88 persen. Reduksi *shortfall* Papua Barat mengalami perlambatan menjadi 1,34 persen pada periode 2012-2013.

Reduksi *shortfall* kabupaten/kota pada tahun 2012-2013 bervariasi besarnya. Peringkat tiga besar reduksi *shortfall* ditempati oleh tiga kabupaten lama. Kota Sorong memiliki reduksi *shortfall* yang paling tinggi untuk periode ini, yaitu mencapai 2,56 persen. Kemudian disusul Kabupaten Fakfak di peringkat kedua dengan capaian sebesar 2,51 persen. Kabupaten Kaimana memiliki capaian reduksi *shortfall* tertinggi ketiga yaitu sebesar 2,25 persen.

Tabel 4.6 Reduksi Shortfall Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	2010-2011	2011-2012	2012-2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Fak-Fak	2,35	1,85	2,51
Kaimana	1,92	1,76	2,25
Teluk Wondama	0,88	2,18	2,22
Teluk Bintuni	1,76	1,26	1,15
Manokwari	1,46	1,26	1,68
Sorong Selatan	0,82	0,74	1,34
Sorong	1,36	0,97	1,66
Raja Ampat	1,34	1,23	1,73
Tambrau	0,61	0,74	0,74
Maybrat	1,28	2,45	1,05
Manokwari Selatan	-	-	-
Pegunungan Arfak	-	-	-
Kota Sorong	2,37	2,88	2,56
Papua Barat	1,62	1,88	1,34

Sumber: Diolah dari Susenas 2011-2013

Pada periode 2011-2012 reduksi *shortfall* Papua Barat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di periode ini reduksi *shortfall* Papua Barat meningkat menjadi 1,88 persen. Sebaran reduksi *shortfall* pada periode ini kurang merata antar kabupaten/kota. Reduksi *shortfall* berada pada kisaran 0,74-2,88 persen dengan capaian tertinggi di Kota Sorong dan terendah berada di Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Sorong Selatan. Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat pada periode ini merupakan kabupaten di Papua Barat yang memiliki reduksi *shortfall* dibawah satu persen.

Berbeda halnya pada reduksi *shortfall* tahun 2011-2012, pada periode tahun 2012-2013 reduksi *shortfall* mengalami perlambatan, dari 1,88 persen menjadi 1,34 persen. Hampir seluruh kabupaten/kota memiliki reduksi *shortfall* diatas satu persen kecuali Kabupaten Tambrau (0,74 persen). Kecepatan perkembangan capaian IPM yang diukur melalui reduksi *shortfall* yang bervariasi ini tentunya dipengaruhi oleh program-program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

BAB V DISPARITAS IPM ANTAR WILAYAH

Paradigma pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian para pembuat kebijakan. Pemerintah daerah kini tidak lagi hanya berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi semata. Pengalaman beberapa negara yang telah sukses, keberhasilan pembangunan manusia biasanya juga akan diikuti oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan manusia tentunya sangat terkait dengan masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang besar dan atau pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat mendatangkan permasalahan dalam kinerja pembangunan manusia karena yang dibangun adalah manusia atau penduduk. Jadi ketika jumlah penduduk besar atau pertumbuhan penduduknya tinggi maka penanganan dalam pembangunan manusia yang mempunyai objek pembangunan manusia/penduduk akan lebih kompleks dibandingkan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil dan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah.

Provinsi Papua Barat memiliki salah satu dari permasalahan tersebut, yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dalam periode tahun 2010-2013 Papua Barat adalah provinsi yang memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu 2,89 persen per tahun. Sebagai daerah yang “baru”, Provinsi Papua Barat adalah provinsi termuda keempat di Indonesia. Dengan predikat sebagai salah satu daerah yang termuda tentu saja provinsi ini sedang dalam kondisi

membangun secara pesat karena harus mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lainnya.

Secara ekonomi, pembangunan Papua Barat tergolong cukup bagus. Hal ini ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi dengan migas di tahun 2013 yang mencapai 9,30 persen (tertinggi di Indonesia). Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional hanya mencapai 5,72 persen pada tahun yang sama. Lalu bagaimana kondisi pembangunan manusia Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota diantara provinsi-provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia?

Sebelum membahas kondisi maupun posisi Papua Barat dan kabupaten/kotanya terhadap daerah lainnya di Indonesia perlu diketahui terlebih dahulu kondisi antar wilayah di Provinsi Papua Barat.

5.1 Posisi Relatif IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Posisi relatif IPM kabupaten/kota di sini adalah keterbandingan relatif antar masing-masing besaran IPM kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat pada tahun 2011-2013.

Adapun posisi relatif masing-masing IPM kabupaten/kota akan diukur melalui kesamaan capaian IPM atau dengan mengukur jarak posisi IPM terhadap suatu besaran relatif yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada gambar boxplot berikut ini akan memberikan gambaran sebaran angka IPM Provinsi Papua Barat 2011-2013. Gambar tersebut menunjukkan apakah sebaran IPM antar wilayah telah terdistribusi dengan baik dan mempunyai sebaran yang relatif homogen.

Kotak pada boxplot memuat 50 persen data atau mempunyai batas persentil ke-25 dan ke-75 sedangkan garis yang ada ditengah kotak adalah nilai median data (nilai tengah). Sedangkan untuk rata-rata, IPM

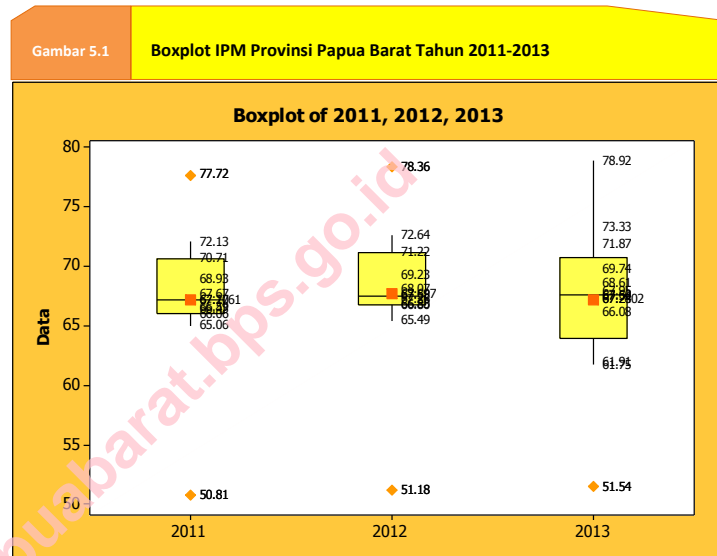
tahun 2012 adalah paling tinggi, kemudian disusul oleh IPM tahun 2013 dan 2011. Hal ini ditunjukkan oleh tanda titik di dalam kotak tahun 2012 yang paling tinggi posisinya dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2011.

Untuk melihat sebaran IPM antar kabupaten/kota dapat diketahui dari gambar boxplot. Bila tanda garis horizontal di dalam kotak tepat persis berada ditengah boxplot, distribusi dapat dikatakan normal atau sebaran IPM antar kabupaten/kota merata. Jika garis horizontal ada disisi agak keatas tandanya distribusi menceng ke kiri dan sebaliknya bila garis horizontal berada agak ke bawah, tandanya distribusi menceng ke kanan. Semakin tanda garis horizontal mendekati atap atau alas boxplot maka kemencengan distribusi semakin ekstrim dan sebaran semakin tidak merata.

Dari ketiga boxplot (IPM 2011-2013) terlihat bahwa posisi garis pada boxplot berada mendekati alas boxplot kecuali pada tahun 2013. Sehingga dapat dikatakan sebaran IPM Papua Barat dari tahun 2011 dan 2012 mempunyai distribusi menceng ke kanan. Artinya sebagian besar IPM kabupaten/kota pada tahun 2011 dan 2012 berada dibawah nilai rata-rata IPM seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat. Pada tahun 2013 terlihat bahwa posisi garis pada boxplot mendekati atap boxplot, artinya sebagian besar IPM kabupaten/kota berada diatas nilai rata-rata IPM seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat.

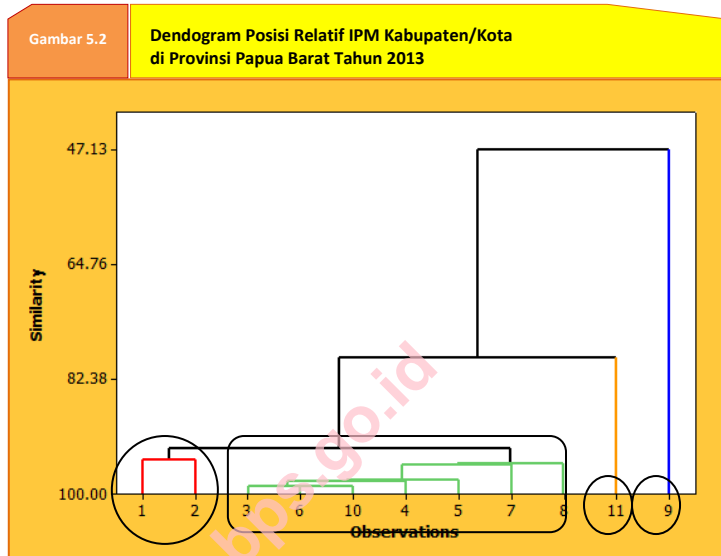
Dari sebaran capaian nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat terdapat dua kabupaten/kota yang nilainya ekstrim dibandingkan dengan kabupaten lainnya (*outlier*). Kedua daerah tersebut adalah Kota sorong dan Kabupaten Tambrau. Kota Sorong memiliki nilai ekstrim jauh diatas capaian kabupaten lainnya, sedangkan Kabupaten Tambrau ekstrim jauh dibawah kabupaten/kota lainnya (wajik warna orange).

Kabupaten Tambrauw adalah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong. Bila dilihat dari infrastruktur wilayah, daerah ini memang sangat jauh tertinggal. Akses untuk menuju distrik maupun kampungnya pun relatif sulit dan membutuhkan biaya yang tinggi.



Sumber: Olah IPM, 2011-2013

Posisi relatif IPM lainnya dapat diketahui dari kesamaan capaian yang telah diraih oleh masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang memiliki capaian IPM yang relatif sama dapat digabungkan ke dalam satu kelompok. Melalui proses ini diharapkan dapat membentuk lebih dari satu kelompok capaian IPM kabupaten/kota, sehingga nantinya dapat berguna untuk melihat posisi relatif capaian IPM.



Sumber: Olah IPM, 2011-2013

Dilihat berdasarkan kesamaan capaian IPM, posisi relatif kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pertama, kelompok IPM bawah. Kelompok ini terdiri dari Kabupaten Tambrau (9), dengan capaian IPM hanya 51,54. Kelompok kedua adalah kelompok menengah bawah, yaitu Teluk Wondama (3), Sorong Selatan (6), Maybrat (10), Teluk Bintuni (4), Kabupaten Manokwari (5), Sorong (7), dan Raja Ampat (8). Kelompok ketiga adalah kelompok menengah menengah yang terdiri dari Kabupaten Fakfak (1) dan Kaimana (2). Sedangkan kelompok yang terakhir adalah kelompok menengah atas adalah IPM Kota Sorong (9). Capaian IPM Kota Sorong mencapai 78,92 poin. Pola ini sedikit mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dengan keluarnya Kabupaten Sorong dari kluster pertama menuju kluster kedua. Hal ini disebabkan kabupaten ini

memiliki perkembangan capaian IPM yang relatif lambat, sehingga tidak mampu mengimbangi kecepatan capaian Fakfak dan Kaimana. Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak belum dapat dikelompokkan dikarenakan kedua kabupaten tersebut belum memiliki series data IPM yang cukup.

Dari empat kelompok tersebut, kluster pertama terdiri dari Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Terlihat disini Kabupaten Kaimana yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Fakfak ternyata mampu mengikuti perkembangan daerah induknya dan mempunyai kesamaan ciri dengan daerah induknya dalam hal capaian IPM.

Kluster kedua terdiri dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Maybrat, Raja Ampat, dan Sorong. Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni merupakan kabupaten yang 'serumpun'. Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Ternyata capaian IPM ketiga kabupaten ini masih memiliki kesamaan ciri dengan kabupaten induknya. Kluster kedua ini ditambah dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat dan juga kabupaten induknya, Kabupaten Sorong. Kedua kabupaten tersebut ternyata juga memiliki kesamaan ciri dengan kabupaten induknya. Sedangkan Kabupaten Maybrat yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan ternyata masih memiliki kesamaan ciri dengan kabupaten induknya dan masuk kedalam kelompok yang sama.

Kluster ketiga hanya terdiri dari Kota Sorong. Sebagai daerah yang memiliki status wilayah administrasi sebagai satu-satunya kota di Papua Barat, tentunya Kota Sorong lebih maju dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kemajuan ini ternyata diikuti pula oleh kemajuan pembangunan

manusianya. Sehingga Kota Sorong menjadi daerah di Papua Barat yang memiliki angka IPM tertinggi dan mempunyai perbedaan ciri dengan kabupaten lainnya.

Kluster yang keempat hanya ditempati oleh Kabupaten Tambrauw. Kabupaten ini sangat berbeda ciri dengan kabupaten/kota lainnya. Capaian IPM Kabupaten Tambrauw juga jauh dibawah wilayah lainnya bahkan dengan kabupaten induknya sekalipun.

5.2 Posisi Relatif IPM Provinsi/Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dari hasil capaian IPM tahun 2006-2009 Provinsi Papua Barat selalu ada di posisi urutan ke-30 dari 33 provinsi di Indonesia diatas Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Namun di tahun 2010, Provinsi Papua Barat naik satu peringkat ke urutan 29 dari 33 provinsi. Papua Barat menggeser posisi Provinsi Maluku Utara yang sebelumnya ada di peringkat diatasnya. Di tahun 2011 dan 2012, posisi Papua Barat masih berada di peringkat 29 seperti tahun sebelumnya. Berbeda halnya dengan dua tahun sebelumnya, posisi papua barat pada tahun 2013 bergeser dua peringkat menjadi peringkat 31 dari 34 provinsi.

Rendahnya peringkat Provinsi Papua Barat karena posisi kabupaten/kota didalamnya juga relatif rendah. Sebagian besar kabupaten di Papua Barat mempunyai peringkat diatas 400 dari sekitar hampir 500-an kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Posisi terbaik IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2008-2013 selalu ditempati oleh Kota Sorong dan posisi terburuk ditempati oleh Kabupaten Raja Ampat (2008) dan Kabupaten Tambrauw (2009-2013).

Peringkat capaian IPM kabupaten/kota tahun 2013 mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun 2012. Setidaknya ada

tiga kabupaten yang mengalami pergeseran peringkat. Kabupaten Teluk Wondama yang pada tahun 2012 berada di peringkat ke-9 naik peringkat menjadi urutan ke-8 bertukar posisi dengan Kabupaten Sorong Selatan. Sedangkan peringkat ke-11 yang semula ditempati oleh Kabupaten Tambrauw sekarang ditempati oleh salah satu kabupaten pemekaran baru yaitu Kabupaten Manokwari Selatan. Sedangkan Tambrauw turun peringkat menjadi peringkat ke-13.

Tabel 5.1 IPM dan Peringkat Nasional IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2013

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat Nasional		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fakfak	72,13	72,64	73,33	247	230	215
Kaimana	70,71	71,22	71,87	306	311	299
Teluk Wondama	66,06	66,80	67,54	449	451	459
Teluk Bintuni	67,17	67,58	67,95	446	439	450
Manokwari	67,67	68,07	68,61	437	426	433
Sorong Selatan	66,59	66,83	67,28	439	444	463
Sorong	68,93	69,23	69,74	382	387	400
Raja Ampat	65,06	65,49	66,08	462	463	474
Tambrauw	50,81	51,18	51,54	489	485	501
Maybrat	66,43	67,26	67,60	454	448	458
Manokwari Selatan	-	-	61,91	-	-	489
Pegunungan Arfak	-	-	61,75	-	-	491
Kota Sorong	77,72	78,36	78,92	30	26	21
Papua Barat	69,65	70,22	70,62	29	29	31

Sumber: Diolah dari Susenas 2011-2013

Perkembangan peringkat capaian IPM secara nasional tahun 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua Barat menduduki peringkat bawah. Sepuluh diantara 13 kabupaten/kota memiliki peringkat diatas 400. Sedangkan bila dilihat dari perkembangan peringkat tahun sebelumnya, terdapat fakta yang cukup memprihatinkan, delapan dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat peringkat IPM-nya turun dibandingkan tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tidak secepat kabupaten/kota di provinsi lainnya.

5.3 Perbandingan Absolut Antar Daerah Dalam Diagram Kuadran

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan ekonomi yang diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tidak selamanya efisien bila tidak dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata.

Kemunculan paradigma pembangunan manusia seakan memberi pencerahan kepada pemerintah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pencapaian kualitas sumber daya manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan kemampuan ekonomi juga wajib diperjuangkan. Baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia mestinya berjalan secara sinergis untuk mewujudkan tujuan akhir yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia di Papua Barat dapat diketahui dengan cara membuat diagram kuadran dengan mengkombinasikan capaian nilai IPM sebagai perwakilan keberhasilan pembangunan manusia dan sebagai

representasi dari pembangunan ekonomi digunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah atas dasar harga konstan 2000 tanpa menyertakan subsektor migas (tanpa migas) sedangkan PDRB per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tanpa migas.

5.3.1 IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas

Diagram kuadran yang pertama adalah mengkombinasikan antara capaian IPM dengan pertumbuhan ekonomi. *Benchmark* yang digunakan adalah nilai agregat IPM Provinsi Papua Barat dan nilai agregat pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat.

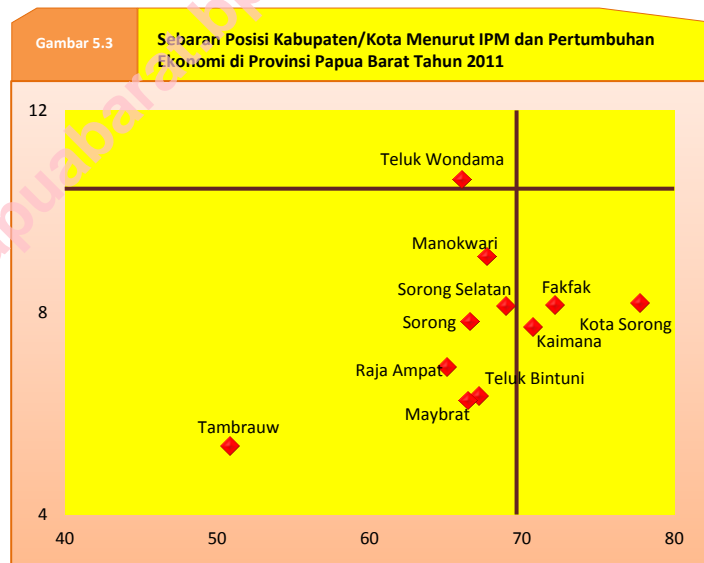
Pembentukan kuadran merupakan perpotongan antara sumbu absis atau sumbu X (IPM) dan sumbu ordinat atau sumbu Y (pertumbuhan ekonomi) dari angka agregat provinsi. Dari perpotongan dua sumbu koordinat tersebut diperoleh empat buah area yang menjadi kuadran-kuadran. Dimana kuadran-kuadran tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria:

- Kuadran I : IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi
- Kuadran II : IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi
- Kuadran III : IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah
- Kuadran IV : IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah

Gambar 5.3 adalah diagram kuadran yang menggambarkan kombinasi capaian nilai IPM tahun 2011 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2011. Di tahun 2011 terjadi sedikit perubahan pada susunan posisi kuadran-kuadran. Semula di tahun 2010 di kuadran pertama hanya

ditempati oleh Kabupaten Kaimana, namun sekarang tidak satupun kabupaten yang berada di kuadran ini.

Kabupaten Kaimana yang pada tahun lalu ada di kuadran I harus turun ke kuadran IV. Dilain sisi dengan Kabupaten Kaimana yang mengalami penurunan posisi di dalam kuadran, Kabupaten Teluk Wondama justru mengalami hal yang sebaliknya. Kabupaten ini memperbaiki posisinya dari kuadran III ke kuadran II yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM rendah. Posisi Kabupaten Teluk Wondama ini kembali seperti semula di tahun 2009 dimana sebelum di tahun 2010 turun ke kuadran III. Posisi Kabupaten Teluk Wondama ini bertukar tempat dengan Kabupaten Manokwari.



Di kuadran I, yang semula ditempati oleh Kabupaten Kaimana kini tidak ada lagi yang menempati. Jadi di tahun 2011 ini, tidak ada

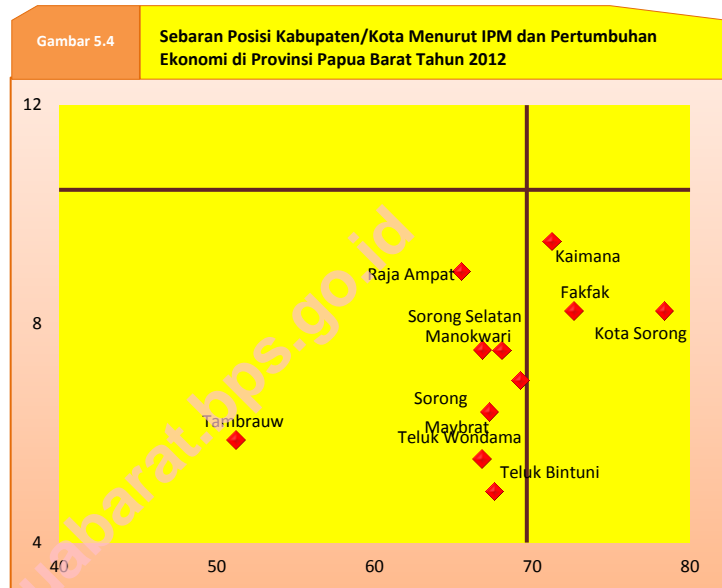
kabupaten/kota yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi dan capaian IPM tinggi melebihi *benchmark*. Kondisi ini dapat dimaknai dengan tidak adanya keseimbangan pembangunan ekonomi dengan pembangunan manusia diantara kabupaten/kota di Papua Barat.

Pertukaran posisi terjadi antara Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Manokwari. Kabupaten Teluk Wondama posisinya membaik dan bergeser di kuadran II, sedangkan sebaliknya Kabupaten Manokwari kondisinya memburuk dan turun di kuadran III. Membaiknya posisi Kabupaten Teluk Wondama terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 10,64 persen terhadap tahun 2010 yang hanya 4,22 persen. Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Manokwari, karena terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi membuat kabupaten ini kalah cepat dengan pertumbuhan ekonomi *benchmark*.

Di kuadran III pada tahun 2011 ditempati oleh tujuh kabupaten/kota. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw. Di Kuadran III, Kabupaten Manokwari memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten dengan posisi IPM tertinggi di kuadran III ditempati oleh Kabupaten Sorong, sedangkan yang terendah ditempati Kabupaten Tambrauw. Kedelapan kabupaten tersebut yang berada di dalam kuadran III memiliki kondisi yaitu IPM yang rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah.

Seperti dibahas pada bagian sebelumnya, Kabupaten Kaimana mengalami penurunan posisi di kuadran IV setelah dua tahun

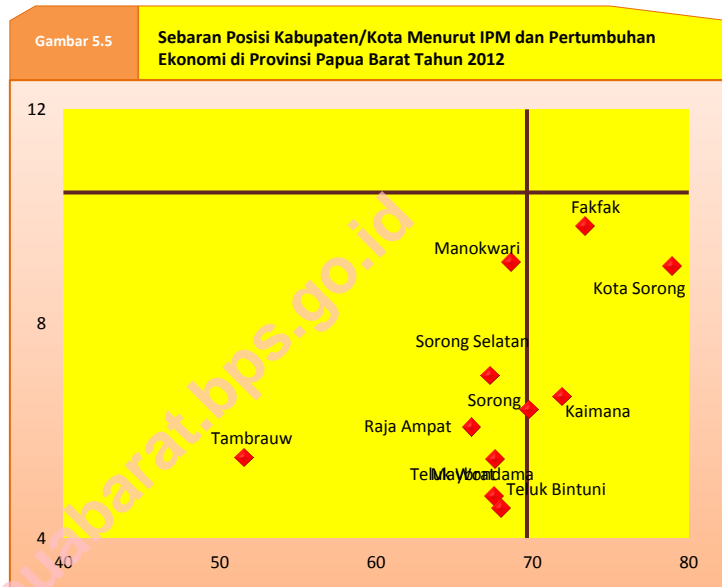
sebelumnya berada diposisi kuadran terbaik karena mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2010.



Gambar 5.4 menjelaskan posisi absolut kabupaten/kota tahun 2012 pada diagram kuadran. Di tahun 2012 juga terjadi sedikit perubahan pada susunan posisi kuadran-kuadran. Semula di tahun 2011 di kuadran kedua hanya ditempati oleh Kabupaten Teluk Wondama, namun sekarang tidak satupun kabupaten yang berada di kuadran ini. Kabupaten Teluk Wondama yang pada tahun lalu ada di kuadran II harus turun ke kuadran III.

Tidak ada satupun kabupaten menempati kuadran I dan II. Dengan kosongnya posisi di kuadran I berarti tidak ada kabupaten/kota yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi dan capaian IPM tinggi melebihi

benchmark. Kekosongan posisi di kuadran II menunjukkan tidak ada kabupaten/kota yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM rendah.



Gambar 5.5 menjelaskan posisi absolut kabupaten/kota tahun 2013 pada diagram kuadran. Di tahun 2013 juga terjadi sedikit perubahan pada susunan posisi kabupaten/kota pada setiap kuadran. Akan tetapi perubahan posisi kabupaten/kota tersebut tidak berakibat pada perpindahan posisi kabupaten/kota ke kuadran yang lain.

Tidak ada satupun kabupaten menempati kuadran I dan II. Dengan kosongnya posisi di kuadran I berarti tidak ada kabupaten/kota yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi dan capaian IPM tinggi melebihi *benchmark*. Kekosongan posisi di kuadran II menunjukkan tidak ada

kabupaten/kota yang memiliki ciri pertumbuhan ekonomi tinggi dan capaian IPM rendah.

Di kuadran III pada tahun 2013 masih ditempati oleh kabupaten/kota yang sama seperti tahun sebelumnya. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Di Kuadran III, Kabupaten Manokwari memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten dengan posisi IPM tertinggi di kuadran III ditempati oleh Kabupaten Sorong, sedangkan yang terendah ditempati Kabupaten Tambrau. Kedelapan kabupaten tersebut yang berada di dalam kuadran III memiliki kondisi yaitu IPM yang rendah dan pertumbuhan ekonomi rendah.

Kondisi pada kuadran IV pada tahun 2013 sama dengan kondisi di tahun 2012. Kabupaten Fak-Fak, Kota Sorong dan Kabupaten Kaimana masih mengisi kuadran IV. Kabupaten yang menduduki posisi pertumbuhan ekonomi tertinggi di kuadran IV yaitu Kabupaten Fakfak dan berpotensi bergeser ke kuadran I karena mendekati garis *benchmark* pertumbuhan ekonomi, sedangkan Kota Sorong menduduki posisi kota yang memiliki IPM tertinggi dan berpotensi pindah ke kuadran IV. Ketiga kabupaten/kota tersebut yang berada di dalam kuadran IV memiliki kondisi yaitu IPM yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah.

5.3.2 IPM Terhadap PDRB Per Kapita

Diagram kuadran yang kedua adalah mengkombinasikan antara capaian IPM dengan PDRB per kapita. *Benchmark* yang digunakan adalah nilai agregat IPM Provinsi Papua Barat dan nilai agregat PDRB per kapita Provinsi Papua Barat.

Pembentukan kuadran merupakan perpotongan antara sumbu absis atau sumbu X (IPM) dan sumbu ordinat atau sumbu Y (PDRB per kapita) dari angka agregat provinsi. Dari perpotongan dua sumbu koordinat tersebut diperoleh empat buah area yang menjadi kuadran-kuadran.

Dimana kuadran-kuadran tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria:

Kuadran I : IPM tinggi dan PDRB per kapita tinggi

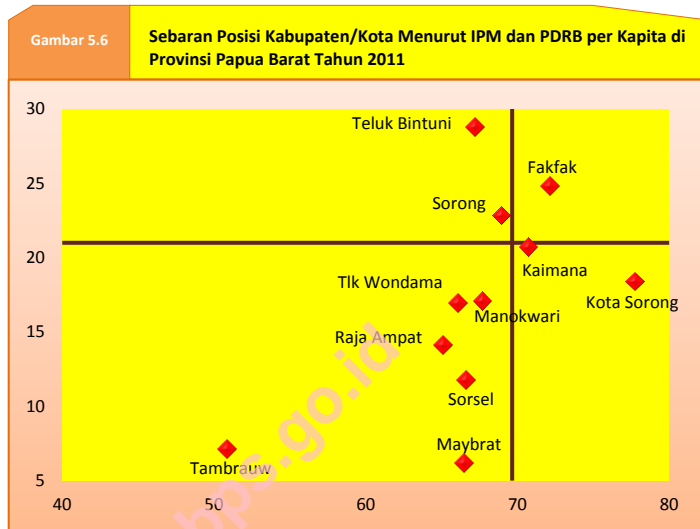
Kuadran II : IPM rendah dan PDRB per kapita tinggi

Kuadran III : IPM rendah dan PDRB per kapita rendah

Kuadran IV : IPM tinggi dan PDRB per kapita rendah

Gambar 5.6 adalah diagram kuadran yang menggambarkan kombinasi capaian nilai IPM tahun 2011 dan PDRB per kapita tahun 2011. Kuadran I ditempati oleh Kabupaten Fakfak. Kabupaten Fakfak mampu melampaui besaran *benchmark* capaian IPM maupun PDRB per kapita, sehingga dapat menempatkan posisi di posisi terbaik, yaitu kuadran I.

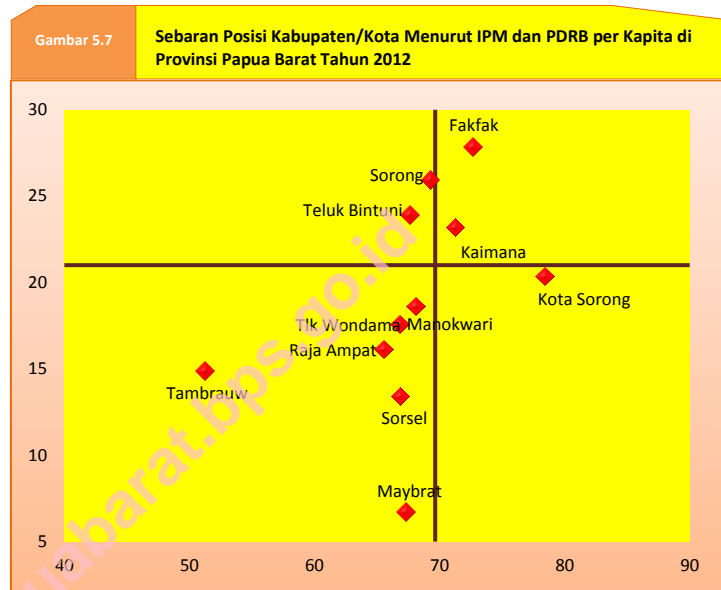
Kuadran II hanya ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong. Kabupaten tersebut memiliki PDRB per kapita yang tinggi tetapi capaian IPM-nya relatif masih rendah, sehingga hanya mampu menempatkan diri pada kuadran II. Kabupaten Sorong memiliki peluang besar untuk bergeser posisi ke kuadran I karena memiliki capaian IPM yang mendekati nilai *benchmark* IPM.



Sebaran posisi kabupaten/kota di tahun 2011 tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2010. Perubahan posisi hanya terjadi pada kuadran I dan IV. Kuadran I yang tahun 2010 lalu ditempati oleh Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, saat ini hanya ditempati oleh Kabupaten Fakfak saja, karena Kabupaten Kaimana bergeser ke kuadran IV. Pergeseran Kabupaten Kaimana ke kuadran IV ini disebabkan oleh perkembangan PDRB per kapita *benchmark* yang tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Kaimana. Cepatnya pertumbuhan PDRB per kapita *benchmark* didorong oleh kinerja ekonomi kabupaten/kota lainnya yang tumbuh dengan pesat.

Kuadran II masih diisi oleh Kabupaten Sorong dan Teluk Bintuni, sedangkan Kuadran III ditempati oleh Kabupaten Manokwari, Teluk Wondama, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, dan Kabupaten

Tambrau. Sedangkan di kuadran IV dihuni oleh Kabupaten Kaimana dan Kota Sorong.



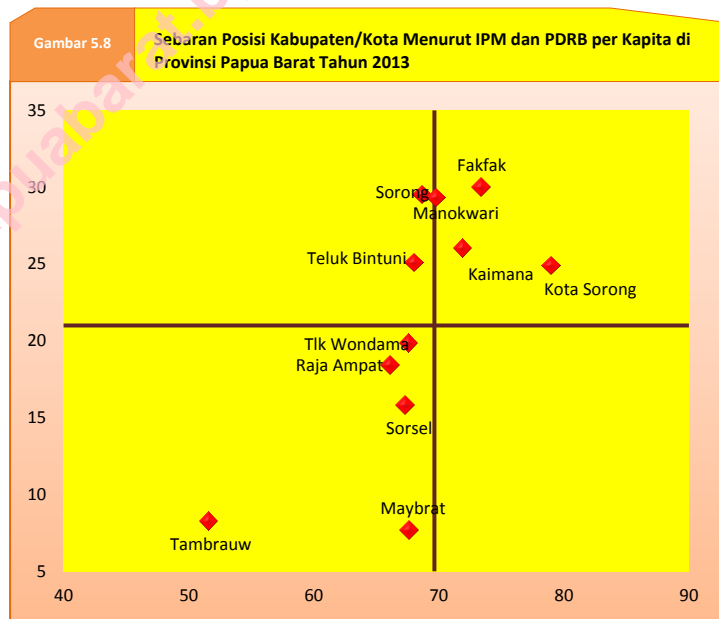
Gambar 5.7 adalah diagram kuadran yang menggambarkan kombinasi capaian nilai IPM tahun 2012 dan PDRB per kapita tahun 2012. Kuadran I ditempati oleh Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Kedua kabupaten/kota ini mampu melampaui besaran *benchmark* capaian IPM maupun PDRB per kapita, sehingga dapat menempatkan posisi di posisi terbaik, yaitu kuadran I.

Kuadran II hanya ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong. Kabupaten tersebut memiliki PDRB per kapita yang tinggi tetapi capaian IPM-nya relatif masih rendah, sehingga hanya mampu menempatkan diri pada kuadran II. Kabupaten Sorong memiliki

peluang besar untuk bergeser posisi ke kuadran I karena memiliki capaian IPM yang mendekati nilai *benchmark* IPM.

Berbeda dengan kuadran II, di kuadran III ditempati oleh enam Kabupaten sekaligus, yaitu Manokwari, Teluk Wondama, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat dan Tambrauw. Ironisnya adalah di kuadran III sebenarnya merupakan kuadran dengan ciri karakteristik yang terburuk diantara kuadran-kuadran lainnya. Ciri kuadran ini adalah memiliki PDRB per kapita rendah dan capaian IPM yang rendah pula.

Kuadran IV yang memiliki ciri PDRB per kapita rendah dan capaian IPM tinggi hanya ditempati oleh Kota Sorong. Hanya Kota Sorong yang berada diatas *benchmark* IPM tetapi berada dibawah *benchmark* PDRB per kapita Papua Barat.



Gambar 5.8 adalah diagram kuadran yang menggambarkan kombinasi capaian nilai IPM tahun 2013 dan PDRB per kapita tahun 2013. Berbeda dengan tahun lalu dimana kuadran I hanya ditempati oleh Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, untuk tahun 2013 terdapat tambahan satu kabupaten/kota yang bergeser masuk ke kuadran I yaitu Kota Sorong. Ketiga kabupaten/kota ini mampu melampaui besaran *benchmark* capaian IPM maupun PDRB per kapita, sehingga dapat menempatkan posisi di posisi terbaik, yaitu kuadran I.

Kuadran II di tahun 2013 ditempati oleh Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Manokwari. Kabupaten tersebut memiliki PDRB per kapita yang tinggi tetapi capaian IPM-nya relatif masih rendah, sehingga hanya mampu menempatkan diri pada kuadran II. Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk bergeser posisi ke kuadran I karena memiliki capaian IPM yang mendekati nilai *benchmark* IPM.

Berbeda dengan kuadran II, di kuadran III ditempati oleh lima Kabupaten sekaligus, yaitu Teluk Wondama, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat dan Tambrau. Kondisi ini berbeda dibandingkan dengan tahun 2012 dimana ada enam kabupaten yang mengisi kuadran III. Ciri kuadran ini adalah memiliki PDRB per kapita rendah dan capaian IPM yang rendah pula.

Kuadran IV yang memiliki ciri PDRB per kapita rendah dan capaian IPM yang rendah. Pada tahun 2012 hanya ditempati oleh Kota Sorong. Kota Sorong di tahun 2013 telah bergeser masuk ke kuadran I sehingga tidak satupun kabupaten/kota ada yang menempati kuadran IV.

Perhatian serius perlu ditujukan pada lima kabupaten yang menempati kuadran III selama tiga tahun berturut-turut. Seperti diketahui

bahwa kuadran ini memiliki ciri dengan kondisi terburuk, yaitu capaian IPM rendah dan PDRB per kapita rendah. Perkembangan dari sisi pembangunan ekonomi tampaknya yang paling realistis mengingat kabupaten di Papua Barat memiliki sumber daya alam berlimpah yang dapat dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Dilain sisi, pembangunan manusia lebih sulit untuk tumbuh secara drastis karena pembangunan manusia adalah investasi jangka panjang dan tanpa dukungan pembangunan ekonomi yang baik maka proses pembangunan manusia juga akan berjalan sangat lambat.

5.4 Analisis Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Penghitungan indeks disparitas pembangunan manusia dengan menggunakan Metode Taksonomik menghasilkan dua komponen indeks disparitas, yaitu Pola Pembangunan (*pattern of development*) dan Ukuran Pembangunan (*measure of development*). Kedua ukuran ini saling berkaitan dalam menentukan besaran indeks disparitas pembangunan manusia. Pola pembangunan digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kabupaten/kota yang menjadi model, dimana semakin tinggi nilai pola pembangunan yang dimiliki suatu kabupaten/kota mengindikasikan bahwa berbagai karakteristik yang dimiliki kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota yang digunakan sebagai model/acuan (nilai pola pembangunan kabupaten/kota model sama dengan nol). Sedangkan ukuran pembangunan digunakan untuk menentukan peringkat indeks disparitas pembangunan manusia suatu kabupaten/kota yang diteliti, jika nilai dari ukuran pembangunan semakin mendekati 1 (satu) maka peringkat indeks disparitas

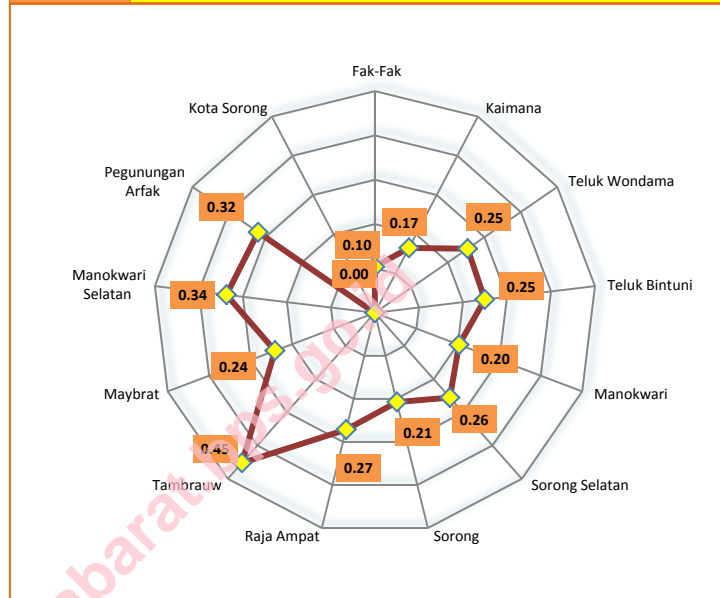
pembangunan manusia kabupaten/kota tersebut semakin jauh dari kabupaten/kota acuan (dimana nilai ukuran pembangunan kabupaten/kota acuan sama dengan nol) atau dengan kata lain kabupaten/kota tersebut semakin tidak berkembang.

Terkait dengan pemilihan kabupaten/kota sebagai acuan, maka dipilih Kota Sorong sebagai acuan dari kabupaten/kota. Alasan pemilihan Kota Sorong menjadi acuan adalah karena Kota Sorong selalu unggul dari semua dimensi dalam komponen penyusun indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan Gambar 5.9, diketahui bahwa nilai ukuran pembangunan indeks disparitas berada pada rentang skala 0,00 hingga 0,45. Dalam gambar terlihat bahwa ukuran pembangunan tersebar dalam lima radius. Pusat radar adalah Kota Sorong sebagai daerah acuan dengan nilai ukuran pembangunan 0,00. Semakin jauh posisi kabupaten dari pusat radar maka semakin tertinggal kabupaten tersebut dalam hal pembangunan manusia. Kabupaten terdekat adalah Kabupaten Fakfak yang terletak pada radius kedua dalam radar. Ini menunjukkan meskipun Kabupaten Fakfak berada pada peringkat kedua namun jarak antara ukuran pembangunan dengan Kota Sorong relatif cukup jauh.

Gambar 5.9

Ukuran Pembangunan dan Peringkat Indeks Disparitas Pembangunan Manusia Tahun 2013



Jarak kabupaten terjauh dari daerah acuan adalah Kabupaten Tambrau. Kabupaten ini berada pada radius ke-5 dan hampir mendekati radius ke-6. Jauhnya jarak antara Kabupaten Tambrau dengan Kota Sorong sebagai daerah acuan memberikan informasi bahwa Kabupaten Tambrau sangat jauh ketinggalan dalam hal pembangunan manusia dari Kota Sorong yang merupakan peringkat pertama.

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Situasi Pembangunan Manusia :

Kesehatan

1. Angka harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2011-2013 cenderung terus mengalami peningkatan.
2. Angka harapan hidup tertinggi di Kota Sorong sebesar 72,80 tahun dan terendah di Kabupaten Tambrauw sebesar 66,48 tahun.
3. Indeks derajat kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2013 sebesar 73,57.

Pendidikan

1. Angka melek huruf selama periode 2011-2013 terus menunjukkan peningkatan.
2. Peningkatan angka melek huruf terjadi di seluruh kabupaten/kota.
3. Perkembangan rata-rata lama sekolah selama periode 2011-2013 meningkat dari 8,26 tahun pada tahun 2011 menjadi 8,45 tahun pada tahun 2012 dan menjadi 8,53 tahun pada tahun 2013. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah termasuk rendah karena rata-rata lama sekolah hanya mencapai kelas 2 SMP. Dengan demikian program Wajar 9 tahun belum tercapai.
4. Indeks pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2013 sebesar 81,71.

Kemampuan Daya Beli

1. Paritas daya beli Provinsi Papua Barat tahun 2013 adalah sebesar Rp. 604.820,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2011 yang mencatat paritas daya beli sebesar Rp 599.280,-.
2. Indeks paritas daya beli tahun 2013 sebesar 56,58.

Gambaran IPM Papua Barat Tahun 2013:

1. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2011 meningkat dari tahun sebelumnya dari 70,22 menjadi 70,62.
2. Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat disebabkan oleh peningkatan ketiga dimensi IPM yaitu umur panjang, pengetahuan, dan kemampuan daya beli.
3. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2013 menempati peringkat 31 dari 33 provinsi di Indonesia atau turun peringkat dibandingkan tahun 2012.
4. IPM Provinsi Papua Barat tahun 2013 termasuk dalam kategori menengah atas dengan capaian 70,62 dalam skala 0 – 100.
5. IPM tertinggi di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2013 diraih oleh Kota Sorong dengan indeks 78,92 dalam skala 0 – 100.
6. IPM terendah di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2013 diraih oleh Kabupaten Tambrauw dengan indeks 51,54 dalam skala 0 – 100.
7. Berdasarkan kriteria UNDP, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat termasuk kelompok menengah.

Angka IPM, baik IPM provinsi maupun kabupaten/kota bergerak dinamis dan mengalami peningkatan yang positif. Pergerakan nilai IPM ini mempengaruhi peringkat suatu daerah terhadap daerah lainnya baik itu dalam satu provinsi maupun secara nasional karena perbedaan kecepatan peningkatan nilai indeks. Tidak jarang kepala daerah maupun pengambil kebijakan yang lain terfokus pada peringkat yang merepresentasikan posisi dimana daerahnya berada. Dari semua itu, ada yang jauh lebih penting dalam menyikapi besaran angka IPM bukan hanya sekedar melihat peringkat, namun bagaimana memberikan perlakuan terhadap angka IPM maupun komponennya tersebut untuk kemajuan pembangunan manusia di setiap daerah.

<http://papuabarat.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Bakrie, Aburizal, (2006), "Mengapa Pembangunan Manusia?" Kompas, 24 Mei 2006.
- BPS. 2005. *Indikator Statistik Bidang Sosial Menurut Jenis dan Penggunaannya*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- , 2006. *Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006 Buku 2 (Kabupaten)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- , 2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2013*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , 2013. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , 2012. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2011*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- , (1996), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 1996*, Jakarta.
- , (2001), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*, Jakarta.
- , (2004), *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2004*, Jakarta.
- , Bappenas, dan UNDP, (1990), *Laporan Pembangunan Manusia 1990*, Jakarta.
- , 2007. *Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS*. BPS: Jakarta.
- , 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. BPS: Jakarta.
- , 2009. *Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Provinsi*. BPS: Jakarta

- , 2010. *Data Strategis BPS 2010*. BPS: Jakarta.
- , 2011. *Data Strategis BPS 2011*. BPS: Jakarta.
- , 2011. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. BPS: Jakarta.
- , 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia*. BPS: Jakarta.
- BPS Provinsi Papua Barat, (2011), *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2010*, BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari
- , (2014), *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat Tahun 2013*, BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari
- , (2014), *Papua Barat dalam Angka Tahun 2013*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha 2013*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2008. *Profil Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2008. *Profil Pendidikan Provinsi Papua Barat Tahun 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- , 2007. *Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Papua Barat 2007*. BPS Provinsi Papua Barat: Manokwari.
- Depdiknas. 2005. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Depdiknas: Jakarta

----- . 2006. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*. Depdiknas: Jakarta.

----- . 2009. www.kemendiknas.go.id

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goal Indonesia 2007*. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta.

UNDP. 2009. *Human Development Report 2009: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development*. United Nation Development programme: New York, USA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indikator dan Sumber Data Pendukung yang Digunakan Dalam Penghitungan IPM

Indikator	Sumber Data
(1)	(2)
A. Kesehatan	
1. Angka Harapan Hidup	Susenas 2011-2013
2. Persentase Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	Susenas 2011-2013
3. Angka Kematian Bayi	Susenas 2011-2013
4. Penolong Kelahiran	Susenas 2011-2013
5. Persentase Balita yang Diimunisasi	Susenas 2011-2013
6. Jumlah Tenaga Kesehatan	Dinkes Papua barat 2011
7. Jumlah Sarana Kesehatan	Dinkes Papua barat 2012
8. Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum	Susenas 2011-2013
9. Persentase Penggunaan fasilitas Tempat Buang Air	Susenas 2011-2013
B. Pendidikan	
1. Angka Melek Huruf	Susenas 2011-2013
2. Rata-rata Lama Sekolah	Susenas 2011-2013
3. Angka Partisipasi Sekolah	Susenas 2011-2013
4. Tingkat Pendidikan	Susenas 2011-2013
C. Perekonomian	
1. PDRB ADHB dan ADHK	PDRB 2013
2. PDRB per Kapita	PDRB 2013
3. Pertumbuhan Ekonomi	PDRB 2013
4. Struktur Ekonomi	PDRB 2013

Lampiran 2. Konversi Tingkat Pendidikan Menjadi Rata-rata Lama Sekolah

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Lama Sekolah
Tidak/Belum tamat SD	0
Tamat SD/Sederajat	6
Tamat SMP/Sederajat	9
Tamat SMA/Sederajat	12
Tamat Diploma I	13
Tamat Diploma II	14
Tamat Diploma III	15
Tamat Sarjana/Diploma IV	16
Tamat S2	18
Tamat S3	21

Lampiran 3. Skor Variabel Kualitas dan Fasilitas Rumah dalam Penghitungan Paritas Daya Beli

No	Variabel	Karakteristik	Skor
1	Jenis lantai	Keramik, Marmer, atau Granit	1
		Lainnya	0
2	Luas lantai per kapita	Lebih dari 10 m ²	1
		Lainnya	0
3	Jenis dinding terluas	Tembok	1
		Lainnya	0
4	Jenis atap terluas	Beton/Kayu/Genteng	1
		Lainnya	0
5	Fasilitas penerangan	Listrik	1
		Lainnya	0
6	Fasilitas air minum	Ledeng	1
		Lainnya	0
7	Fasilitas jamban	Milik sendiri	1
		Lainnya	0
8	Skor awal setiap rumah	Rumah	1
		Lainnya	0

Lampiran 4. Daftar Paket Komoditi yang Digunakan untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

No	Komoditi	Unit	Proporsi dari Total Konsumsi (%)
1	Beras Lokal	Kg	7,25
2	Tepung Terigu	Kg	0,10
3	Singkong	Kg	0,22
4	Tuna/Cakalang	Kg	0,50
5	Teri	Ons	0,32
6	Daging Sapi	Kg	0,78
7	Ayam	Kg	0,65
8	Telur	butir	1,48
9	Susu Kental Manis	397 gram	0,48
10	Bayam	Kg	0,30
11	Kacang Panjang	Kg	0,32
12	Kacang Tanah	Kg	0,22
13	Tempe	Kg	0,79
14	Jeruk	Kg	0,39
15	Pepaya	Kg	0,18
16	Kelapa	butir	0,56
17	Gula	Ons	1,61
18	Kopi	Ons	0,60
19	Garam	Ons	0,15
20	Merica	Ons	0,13
21	Mie Instan	80 gram	0,79
22	Rokok Kretek	10 batang	2,86
23	Listrik	Kwh	2,06
24	Air Minum	M ³	0,46
25	Bensin	liter	1,02
26	Minyak Tanah	liter	1,74
27	Sewa rumah	unit	11,56
Total			37,52

Lampiran 5. Rata-rata Jumlah Hari Sakit pada Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Tahun 2013.

Kabupaten/kota	Lama hari sakit (hari)				Total
	<= 3	4 - 7	8 - 14	> 15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Fakfak	44,82	40,21	9,03	14,97	100,00
Kab. Kaimana	60,85	31,15	4,64	8,01	100,00
Kab. Teluk Wondama	47,00	46,66	2,18	6,35	100,00
Kab. Teluk Bintuni	68,48	25,36	2,85	6,16	100,00
Kab. Manokwari	40,44	47,76	8,34	11,80	100,00
Kab. Sorong Selatan	52,52	42,17	,48	5,31	100,00
Kab. Sorong	61,56	31,58	3,80	6,86	100,00
Kab. Raja Ampat	77,68	21,50	,27	0,82	100,00
Kab. Tambrau	51,30	38,96	9,75	9,75	100,00
Kab. Maybrat	20,42	70,24	6,47	9,34	100,00
Kab. Manokwari Selatan	-	-	-	-	-
Kab. Pegunungan Pegaf	-	-	-	-	-
Kota Sorong	57,92	36,94	2,25	5,14	100,00
Prov. Papua Barat	54,70	37,73	4,38	7,57	100,00

Lampiran 6. Persentase Cara Pengobatan yang Dilakukan Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Kab./Kota di Prov Papua Barat 2013.

Kabupaten/Kota	Pengobatan Sendiri	Pengobatan ke Sarana Kes	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Fakfak	45.37	57.31	100,00
Kab. Kaimana	48.44	46.66	100,00
Kab. Teluk Wondama	74.86	25.62	100,00
Kab. Teluk Bintuni	51.91	48.99	100,00
Kab. Manokwari	64.99	33.20	100,00
Kab. Sorong Selatan	36.19	64.45	100,00
Kab. Sorong	57.41	46.10	100,00
Kab. Raja Ampat	39.06	57.90	100,00
Kab. Tambrau	45.20	48.22	100,00
Kab. Maybrat	60.52	39.06	100,00
Kab. Manokwari Selatan	-	-	-
Kab. Pegunungan Pegaf	-	-	-
Kota Sorong	59.54	41.48	100,00
Prov. Papua Barat	56.11	43.58	100,00

Lampiran 7. Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli
Penghitungan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat Tahun
2011-2013.

Kabupaten/kota	Indek Kesehatan			Indeks Pendidikan			Indeks Daya Beli		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kab. Fakfak	76,47	77,07	77,22	86,02	86,74	87,53	53,68	54,13	55,24
Kab. Kaimana	74,80	75,18	75,18	81,39	82,32	83,64	55,76	56,16	56,79
Kab. Teluk Wondama	71,27	71,68	71,77	70,82	72,61	74,12	55,92	56,10	56,72
Kab. Teluk Bintuni	72,57	73,13	73,16	73,38	73,85	74,31	55,54	55,76	56,40
Kab. Manokwari	72,15	72,63	72,89	77,78	78,31	79,14	52,95	53,28	53,81
Kab. Sorong Selatan	69,70	69,98	70,11	76,69	76,96	77,05	53,20	53,57	54,67
Kab. Sorong	72,03	72,65	72,74	79,09	79,25	79,59	55,61	55,79	56,89
Kab. Raja Ampat	69,17	69,70	70,11	79,08	79,63	80,22	46,73	47,13	47,92
Kab. Tambrauw	68,85	69,13	69,13	64,32	64,48	64,77	19,20	19,93	20,72
Kab. Maybrat	69,37	69,87	69,92	77,87	80,01	80,13	51,58	51,89	52,75
Kab. Manokwari Selatan			69,40			67,42			48,90
Kab. Pegunungan Pegaf			69,88			67,91			47,47
Kota Sorong	78,93	79,20	79,67	89,63	90,88	90,96	64,41	65,00	66,12
Prov. Papua Barat	73,02	73,56	73,57	80,63	81,27	81,71	55,30	55,82	56,58

DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://papuabar.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

Jln. Trikora Sowi IV - Manokwari - Papua Barat - 98315
Telp. 0986.214119 Fax. 0986.214119
E-mail : bps9100@bps.go.id
Homepage : www.irjabar.bps.go.id